

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN  
PEMBUANGAN BAYI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ADJIE SANTANU**

**NPM: 5116500011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN  
PEMBUANGAN BAYI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ADJIE SANTANU**

**NPM: 5116500011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN  
PEMBUANGAN BAYI**

**Adjie Santanu**  
**NPM: 5116500011**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 20 Januari 2020

Pembimbing I



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.**  
**NIDN. 0615067604**

Pembimbing II



**Kanti Rahayu, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620108203**

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.**  
**NIDN. 0615067604**

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN  
PEMBUANGAN BAYI**

**Adjie Santanu**  
**NPM. 5116500011**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 20 Januari 2020

Penguji I



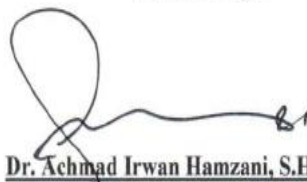
**Dr. Hamidah Abdurrachman**  
**NIDN. 0605105501**

Penguji II



**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**  
**NIDN. 060808770**

Pembimbing I



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.L., M.Ag.**  
**NIDN. 0615067604**

Pembimbing II



**Kanti Rahayu, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620108203**

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.L., M.Ag.**  
**NIDN. 0615067604**

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjie Santanu  
NPM : 5116500011  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 13 April 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
PENINDAKAN KEJAHATAN  
PEMBUANGAN BAYI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 20 Januari 2020

Yang menyatakan

  
Adjie Santanu

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung belum dapat menjadi pribadi seutuhnya. Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan tentang penerapan pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penindakan kejahatan pembuangan bayi; 2. Mengkaji kebijakan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kepustakaan “*library research*”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara untuk data primer, serta penelusuran secara konvensional dan “*online*” untuk data sekunder, dan dianalisis dengan metode data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kebijakan hukum pidana sebelum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur kejahatan pembuangan bayi, pelaku kejahatan pembuangan bayi masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci: Undang-Undang, Kejahatan, Pembuangan Bayi.**

## **ABSTRACT**

*Legal protection for children takes precedence because of the nature of children who tend to not be able to become fully personal. Disposal of infants is an act that seriously damages the humanity and morals associated with existing norms, moreover the crime of disposal of infants is a criminal offense.*

*This study aims to: 1. Describe the application of criminal law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Children against the Crime of Disposing of Infants; 2. Reviewing policies to deal with the perpetrators of the crime of disposal of infants.*

*This type of research will be used is the library research library, the approach in this study is a normative approach. Data collection techniques through interviews for primary data, as well as conventional and online searches for secondary data, and analyzed using qualitative data methods.*

*The results of this study indicate that Article 76B of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is an act carried out by everyone in placing, allowing, involving, ordering involving children in treatment situations wrong and neglect. Criminal law policy prior to the existence of a law specifically regulating the crime of disposal of infants, the perpetrators of the crime of disposal of infants are still subject to the provisions of the Criminal Code. But with the principle of legislation that is the principle of "lex specialis derogat legi generali" which means that the rule of law that is specific overrides the more general rule of law. The crime prevention policy or also called criminal politics has the main objective of protecting the community to achieve social welfare.*

*Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.*

**Keywords:** *Law, Crime, Baby Disposal.*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Tarsana dan Ibu Rani'ah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Adik tercinta Usman Bayu Sajiwo.
3. Calon Istri Sofiani Dewi, S.Pd., yang setia menemani dan mendukung.
4. Sahabat Avengers Alvin, Ambi, Bagas, Dhany, Rizal, dan Bolki.
5. Seluruh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Unit Kegiatan Otonom Mahasiswa Fakultas Hukum, Kepanitiaan BEM-FH periode 2018-2019.
6. Teman-teman sejawat KKN Desa Tanjungsari 2019.
7. Rekan-rekan kelas A, C, dan Pidana.
8. Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019.
9. Dosen pembimbing (Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag. dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H.)



## **MOTTO**

*“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.*

(QS. Al-An’am Ayat 140)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *allhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

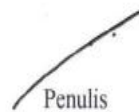
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt., membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt., penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 20 Januari 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....</b>	 <b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	29
B. Tinjauan Umum tentang Pembuangan Bayi.....	36
1. Pengertian Pembuangan Bayi .....	36
2. Tindak Pidana Pembuangan Bayi menurut Undang-Undang .....	43
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	49
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	49
2. Teori Pemidanaan .....	60

3. Jenis-Jenis Pidana .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Penerapan Pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi .....	78
B. Kebijakan Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum terhadap anak lebih diutamakan karena sifat alamiah anak belum dapat menjadi pribadi seutuhnya, untuk itu perlindungan hukum terhadap anak sudah dimulai bahkan sejak berada dalam kandungan (bayi). Hal ini kemudian dikenal dengan istilah fiksi hukum<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2) mengatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* dalam hal ini termasuk bayi.

Kemudian diatur lebih rinci pada Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*. Serta diancam dengan pidana yang tertuang pada Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa: *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara*

---

<sup>1</sup>Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*, UBELAJ, Volume 3, Nomor 1, April, 2018, hlm. 24.

*paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)''.*

Adapun pelaku kejahatan pembuangan bayi juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak anak dimana sejak masih dalam kandungan (janin) berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (4) mengatakan:<sup>2</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan seiring dengan maraknya pembuangan bayi, agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Pembuangan bayi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan membuang anak yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain<sup>3</sup>. Seperti halnya pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Brebes, bayi dibuang di saluran irigasi sawah Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada bulan Mei 2019.

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut, dan salah satu cara untuk menjaga eksistensinya dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus menjadi asset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama disebut negara<sup>4</sup>.

Anak dalam hukum digolongkan sebagai subjek hukum yang melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Pembahasan terhadap hak-hak lebih diutamakan untuk dipenuhi, karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subjek hukum "*natuurlijkepersoon*". Tidak atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan pembahasan terhadap bayi dianggap sama dengan seorang anak, karena memiliki persamaan konsep belum dewasa. Dengan demikian segala

---

<sup>3</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 29.

<sup>4</sup>Airlangga Justitia, *Op.cit.*, hlm. 23.



peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya<sup>5</sup>.

Anak merupakan bagian dari generasi bangsa yang menjadi salah satu sumber daya manusia sebagai penerus cita-cita perjuangan. Anak memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang<sup>6</sup>. Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana<sup>7</sup>.

Hukum merupakan seperangkat kaidah dan aturan tersusun dalam suatu sistem yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat. Hukum bersumber dari sekumpulan masyarakat maupun sumber lain yang diakui keberadaanya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut. Serta benar-benar diberlakukan oleh masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memunculkan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal<sup>8</sup>.

Hukum merupakan semua aturan, baik berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis, diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>6</sup>R., Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.

<sup>7</sup>Airlangga Justitia, *Loc.cit.*, hlm. 25.

<sup>8</sup>Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

yang memiliki sanksi tegas dan nyata bagi yang melanggarnya. Fungsi hukum secara garis besar sebagai alat pengendalian sosial “*a tool of social control*”. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat “*a tool of social engineering*”. Juga sebagai alat ketertiban masyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin<sup>9</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penindakan kejahatan pembuangan bayi?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi?

---

<sup>9</sup>Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 224.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tentang penerapan pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penindakan kejahatan pembuangan bayi.
2. Mengkaji kebijakan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa atau akademisi sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan pembuangan bayi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam memproses, memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan pembuangan bayi agar menjatuhkan pemidanaan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Serta sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dengan masalah kejahatan pembuangan bayi.

## E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Airlangga Justitia (2018) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul "*Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*"<sup>10</sup>. Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang tindakan membuang anak yang baru lahir jelas merupakan tindak pidana, karena tindakan ini tidak mencerminkan sisi humanisme dari pribadi manusia. Menurut sifatnya tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum, tindakan ini juga bisa merugikan masyarakat, dalam arti kontradiktif atau menghambat implementasi sosial tatanan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang memuat sanksi pidana pembuangan bayi atau anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Eli Julimas Rahmawati (2017) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)*". Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang upaya penegakan hukum beserta hambatan-hambatannya terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

---

<sup>10</sup>Airlangga Justitia, *Loc.cit.*, hlm. 23.

hukum pidana terkait penelantaran bayi yang diberlakukan berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya penegakan hukum terkait penelantaran bayi dilaksanakan oleh Penyidik di Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, dan Hakim di Pengadilan Negeri<sup>11</sup>.

3. Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan (2018) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali”*. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali. Upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali dan hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali<sup>12</sup>.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian terkait dapat terlihat dari variabel dan objek penelitian, metode penelitian dan lokasi penelitian, objek penelitian yang dijadikan pengamatan penulis merupakan sebuah permasalahan yang dilakukan ditengah masyarakat. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan *“library research”* penulis menggabungkan gagasan yang tertera pada dokumen-dokumen hukum dan didukung oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara. Kemudian mengkaji aspek pembedaan

---

<sup>11</sup>Eli Julimas Rahmawati, *Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana*, URECOL, Maret, 2017, hlm. 295.

<sup>12</sup>Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 1.

sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dianalisis menggunakan data kualitatif serta diuraikan melalui kalimat induktif. Lokasi yang dijadikan bahan penelitian merupakan tempat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian terkait.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan "*library research*". Penelitian kepustakaan "*library research*" merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder<sup>13</sup>. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau permasalahan hukum secara boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku<sup>14</sup>. Suatu pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, mengkaji ketentuan hukum yang tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi.

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 68.

<sup>14</sup>Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2019, hlm. 3.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain<sup>15</sup>. Data primer digunakan untuk memperkaya gagasan dari para praktisi hukum agar penindakan terhadap kejahatan pembuangan bayi berlandaskan hukum progresif. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara untuk data primer, serta penelusuran kepustakaan secara konvensional dan “*online*” untuk data sekunder. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, penelusuran kepustakaan secara konvensional merupakan kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran kepustakaan secara “*online*” merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet<sup>16</sup>. Wawancara dilakukan dengan para narasumber untuk memperdalam informasi yang diperlukan untuk memperkuat analisis. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 181.

<sup>16</sup>*Ibid.*

perpustakaan, pembelian buku, jurnal, dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Sedangkan penelusuran “*online*” dilakukan dengan cara “*searching*” di internet.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>17</sup>. Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan secara naratif deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing saling berkaitan, keempat Bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105.



Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Tindak Pidana, Pembuangan Bayi, Pidana dan Pemidanaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, mengenai penerapan pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penindakan kejahatan pembuangan bayi dan mengkaji kebijakan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian dari peristiwa-peristiwa konkret, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah<sup>18</sup>.

Banyak istilah terkait dengan tindak pidana, ada yang menggunakan istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Pengertian dalam bahasa Jerman dan Belanda digunakan dengan istilah “*delict*”. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia bersumber dari “*Wetboek van Strafrecht Nederl*” menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan tindak pidana<sup>19</sup>. Simons merumuskan “*strafbaar feit*” merupakan kelakuan yang diancam dengan

---

<sup>18</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

<sup>19</sup>Tom Fernando Napitupulu, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm. 15, t.d.

pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>20</sup>.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, beberapa pendapat para ahli mengartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan menjadi 5 (lima) macam istilah yang lazim digunakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht dan Sianturi (1986: 206) dan lain-lain;
- b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljanto (1983: 54) dan lain-lain;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan Sianturi (1986: 206) dan lain-lain;
- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R. Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
- e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Beberapa pendapat di atas menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moeljanto beralasan bahwa digunakannya istilah perbuatan pidana karena kata perbuatan lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kedalam melakukan dan kepada akibatnya. Perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”<sup>22</sup>.

Lebih jelasnya Moeljanto mengatakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Jika menurut Utrecht sudah lazim memakai istilah hukum. Maka hukum berarti “*berecht*”, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan “*starf*”, dipidana karena perkara-perkara perdata pun “*berech*”. Maka memilih untuk terjemahan “*strafbaar*” adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana;
- b. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dengan menunjuk kepada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya merupakan “*handling*” atau “*gedraging*”. Seseorang mungkin atau tidak, juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

H.J. Van Schravendijk mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum. Sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurutnya meliputi perbuatan “*andelen*” atau “*doen*” positif melainkan “*visum*” atau negatif atau maupun akibatnya<sup>24</sup>. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana

---

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 56.

<sup>23</sup>S.R., Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem Petehaem, hlm. 207.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 291.

suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum. Serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab<sup>25</sup>.

Mengenai pengertian "*strafbaar feit*", Sudarto membagi menjadi 2 (dua) pandangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan tumpukan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan;
- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan pengertian perbuatan pidana "*criminal act*" dan pertanggungjawaban pidana "*criminal responsibility*".

Tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana, istilah delik berasal dari kata "*delict*" dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana, istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh. Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa "*criminal act*" dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah "*delict*", digunakan juga istilah "*strafbaar feit*". Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah "*crime*" atau "*offence*"<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 211.

<sup>26</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 30.

<sup>27</sup>Dimas Arief Ramadhani, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung*, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, 2019, hlm. 14, t.d.

Tindak pidana merupakan gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan-undangan yang ada. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana<sup>28</sup>. Moeljatno mengemukakan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana merupakan sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukum menimbulkan 3 (tiga) pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu

---

<sup>28</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 28.

<sup>29</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 22-23.

diartikan bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain dan tanpa hak<sup>30</sup>.

Beberapa istilah yang dipergunakan oleh para ahli sebagai terjemahan delik “*strafbaar feit*” menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna “*strafbaar feit*”, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya. Misalnya saja Wirjono Prodojokoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962. Sedangkan selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun) menggunakan istilah tindak pidana.

Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah (tindak) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, “*active handting*” atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan “*passive handeling*”<sup>31</sup>. Istilah perbuatan menurut Satocid Kartanegara berarti melakukan, berbuat “*actieve handeling*” tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan hanya kepada tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana “*strafbaar feit*” yang setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Bukan hanya Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik “*strafbaar feit*” tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin pula selama

---

<sup>30</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 1-3.

<sup>31</sup>S.R., Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 207.

kurang lebih 20 (dua puluh tahun) mendalami makna *“strafbaar feit”*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh kepada istilah delik. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana Moeljatno. Menerangkan bahwa tindak pidana merupakan:<sup>32</sup> *“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”*.

Menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana yaitu:<sup>33</sup> *“Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar. Harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum”*. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan *“handeling”* dan pengabaian *“nalaten”*, tidak berbuat, berbuat pasif. Biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima unsur) yaitu:<sup>34</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

---

<sup>32</sup>Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>33</sup>Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225.

<sup>34</sup>S.R., Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 211.



- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP. Karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang yakni:<sup>35</sup> *“Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”*.

Sudarto memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:<sup>36</sup> *“Istilah strafbaar feit dengan istilah tindak pidana, alasannya pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal asal diketahui apa yang dimaksud dan dalam hal yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, istilah ini sudah dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai sosilogishie gelding”*. Kemudian Lamintang menjelaskan sebagai berikut:<sup>37</sup> *“Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan”*.

---

<sup>35</sup>P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

<sup>36</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Alumni, 2006, hlm. 35.

<sup>37</sup>Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surakarta: Pustaka Tinta Emas, hlm. 25.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing “*strafbaar feit*”. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah “*strafbaar feit*” dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya. Karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataupun sekedar mengalihkan bahasanya<sup>38</sup>. Hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat.

Tindak pidana diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu tentang perbuatan pidanya sendiri, berdasarkan asas legalitas “*Principle of legality*”<sup>39</sup>. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*”, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu, sebagaimana telah dibahas pada Sub-Bab sebelumnya.

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Kesengajaan “*dolus*” dan kealpaan “*culpa*” merupakan bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan “*schuld*” yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga atas perbuatannya harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili. Bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya<sup>40</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) sudut pandang yakni: “*Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang merupakan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan*”<sup>41</sup>. Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 78-79.

mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang diberikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya.

Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli yang satu dengan lainnya, namun tidak berbeda jauh, begitu pula mengenai konsep unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang akan lebih jelas ketika kita membaca pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku.

a. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan kembali bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup>Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 63.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Unsur-Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subjektif menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku, mengenai tingkah laku atau perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dua dari 8 (delapan) unsur tersebut, yakni kesalahan dan melawan hukum merupakan termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya

---

<sup>43</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 81-82.

berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada Pasal 362 (pencurian) diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Juga pada Pasal 253 (pemalsuan materai dan merek) pada kalimat (menggunakan cap asli secara melawan hukum) berupa melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya dengan menyebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum<sup>44</sup>.

Begitu pula unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat. Mengenai unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung atas bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Van Hamel mengartikan 3 (tiga) perbuatan "*feit*", yakni:<sup>45</sup>

- a. Perbuatan "*feit*" terjadinya kejahatan "*delik*". Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, hlm. 175.

dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian. Maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan itu;

- b. Perbuatan "*feit*" merupakan yang didakwakan. Ini terlalu sempit, misalnya seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, ternyata sengaja melakukan sebuah pembunuhan. Berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar (sengaja melakukan pembunuhan) karena hal ini lain daripada (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Van Hamel tidak menerima pengertian perbuatan "*faith*" dalam arti yang kedua ini;
- c. Perbuatan "*feit*" merupakan perbuatan materill. Perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat, dengan pengertian ini maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Unsur-Unsur delik pembunuhan dalam berkualifikasi ini terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Dengan adanya didahului dan disertai (unsur objektif)

Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan atau tindak pidana lain dapat dilakukan atau memungkinkan dilakukan. Unsur yang disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan atau tindak pidana lain;

---

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 77.

b. Kedapatan (unsur subjektif)

Istilah kedapatan ini sebagai terjemahan atas “*betrapping opheeterdaad*” yang ketika melakukan tindak pidana diketahui oleh orang lain. Pengertian ini lebih sempit daripada tertangkap tangan “*ontdekking op heeterdaad*”.

Ada 3 (tiga) unsur dalam tindak pidana pembuangan bayi yaitu:

- a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian korban;
- b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun menyakiti korban;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban<sup>47</sup>.

Seseorang dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena telah melakukan suatu perilaku lahiriah “*outward conduct*” yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Terdapat juga pada ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal dengan “*actus reus*”. Dengan kata lain “*actus reus*” merupakan elemen luar “*eksternal element*”<sup>48</sup>. Kepustakaan hukum “*actus reus*” ini sering digunakan padanan kata “*conduct*” untuk perilaku yang menyimpang menurut kacamata hukum pidana, atau dengan kata lain, “*actus reus*” dipadankan dengan kata “*conduct*”.

---

<sup>47</sup>A., Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 134.

<sup>48</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34.



Terdapat dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*”, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai (bertentangan dengan hukum), bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara;
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif);
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya pada tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya (tanpa wenang) atau (tanpa hak);
- d. Menurut Vos, Moeljatno memberikan definisi (bertentangan dengan hukum) artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum menurut anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Kepustakaan hukum mengatakan bahwa “*actus reus*” terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, dimana dalam kedua frasa tersebut, “*act*” sama dengan “*commission*”. Karena pengertian “*actus reus*” bukan mencakup “*act*” atau “*commission*” saja, tetapi juga “*omission*”. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata “*actus reus*” dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata “*conduct*” dalam bahasa

---

<sup>49</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana* 1, Bandung: CV Armico, hlm. 151.

Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membahas mengenai tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret. Sedangkan pelanggaran hanya membahayakan "*in abstracto*". Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang warga Indonesia

---

<sup>50</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 28.

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut;

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana;

3) Pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya<sup>51</sup>.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangannya berupa akibat yang dilarang. Maka siapa yang menimbulkan akibat dilarang itulah yang mempertanggungjawabkan dan dipidana, begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan. Tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Semisal wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan.

c. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja “*dolus*” dan tindak pidana tidak sengaja “*culpa*”. Tindak pidana sengaja

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

merupakan tindak pidana dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa;<sup>52</sup>

- d. Menurut macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan perbuatan mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak pidana aktif<sup>53</sup>.

Tindak pidana pasif memiliki 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>53</sup>*Ibid.*

yang mengandung suatu akibat terlarang. Tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujud atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan masih berlangsung terus, disebut juga dengan "*voordurende delicten*". Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang;<sup>54</sup>
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Hal ini sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP;<sup>55</sup>
- g. Menurut sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana "*communis*" (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana "*propria*" (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>55</sup>*Ibid.*

orang yang berkualitas tertentu). Tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, adanya perbuatan-perbuatan tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya;<sup>56</sup>

- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini merupakan tindak pidana dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Korban dalam perkara perdata, keluarga (wakilnya) dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak;<sup>57</sup>
- i. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok dengan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Ada tindak pidana tertentu bilamana dilihat dari berat ringannya yang menjadi:

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>57</sup>*Ibid.*

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok. Melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokok atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya<sup>58</sup>.

- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan, sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP. Misalnya dalam Buku II KUHP, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP);

- k. Menurut sudut berapa banyak perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP merupakan berupa tindak pidana tunggal, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa<sup>59</sup>.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa *“Baik kejahatan dan pelanggaran merupakan sebuah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”*<sup>60</sup>. Kejahatan dan pelanggaran dahulunya dibedakan secara kualitatif untuk membedakan suatu perbuatan yang tanpa diatur di dalam Undang-Undang. Namun sudah dirasa menciderai norma-norma dalam masyarakat maka digolongkan menjadi kejahatan. Sedangkan perbuatan yang baru disadari sebagai sebuah perbuatan yang menciderai norma-norma dalam masyarakat ketika perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang digolongkan menjadi pelanggaran.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>60</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 107.



## **B. Tinjauan Umum tentang Pembuangan Bayi**

### **1. Pengertian Pembuangan Bayi**

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Bayi baru lahir merupakan bayi yang dilahirkan baik dalam kondisi cukup bulan atau hampir cukup bulan. Bayi prematur merupakan bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) minggu dan berat lahir kurang dari 2500 (dua ribu lima ratus) gram<sup>61</sup>.

Pembuangan bayi merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan penelantaran anak sesuai dengan pembatasan permasalahan, tindak pidana pembuangan bayi memang tidak dikenal dengan tindak pidana penelantaran anak. Pembuangan memiliki arti (proses, cara, perbuatan membuang)<sup>62</sup>, sedangkan membuang diartikan sebagai (melepas atau melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan (melemparkan atau mencampakkan)<sup>63</sup>. Dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan perbuatan mencampakkan anak berusia 0-12 bulan dengan sengaja. Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bayi cukup

---

<sup>61</sup> Abdullah Royyan, *Asuhan Keperawatan Klien Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

<sup>62</sup> <https://www.artikata.com/arti-360391-pembuangan.html>, Diakses 14 November 2019.

<sup>63</sup> <https://www.artikata.com/arti-360379-membuang.html>, Diakses 14 November 2019.

bulan yang dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa ditempat yang tidak semestinya.

Menurut Imelda faktor yang menyebabkan pembuangan bayi sebagai berikut:

- a. Pergaulan bebas zaman sekarang, kurangnya perhatian dari orang tua mempengaruhi pergaulan dari remaja zaman sekarang;
- b. Bebasnya akses internet, banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet untuk berbuat hal yang tidak semestinya, seperti mengunduh vidio porno kemudian mempraktekkan, salah satu penyebab terjadinya hamil diluar nikah;
- c. Sosial media juga berpengaruh, chatting dengan orang yang tidak dikenal kemudian diajak ketemu dan diajak berhubungan badan;
- d. Jika orang yang menghamili tidak mau bertanggungjawab, maka melahirkan bayi di luar masyarakat akan timbul ketakutan dikucilkan dalam masyarakat;
- e. Faktor ekonomi berpengaruh ketidakmampuan untuk menghidupi bayi yang akan dilahirkan kelak<sup>64</sup>.

Kejahatan tersebut bisa terjadi karena didorong oleh hal-hal lain, Ridwan mengemukakan terdapat 2 (dua) faktor penyebab kejahatan pembuangan bayi yaitu:

- a. Faktor ekonomi;
- b. Faktor akibat hubungan gelap.

---

<sup>64</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016, Hlm. 100.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembuangan bayi sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Perasaan malu atau takut diketahui oleh keluarga

Perasaan malu yang mendorong melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Melahirkan seorang bayi dengan keadaan belum menikah atau berzina menimbulkan perasaan malu. Untuk menghindari rasa malu, pelaku panik dan mencari solusi agar menghilangkan perasaan tersebut. Akhirnya menghalalkan segala cara termasuk membuang bayinya sendiri;

b. Hamil di luar nikah

Pergaulan yang bebas merupakan salah satu faktor. Banyak orang berpacaran sudah melampaui batas. Banyak perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) pasti tidak terlepas dari seks bebas. Banyak dari mereka yang kebobolan, jadi hamil tanpa ikatan pernikahan;

c. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua

Keluarga mempunyai peran penting dalam perkembangan seorang individu. Perhatian dan kasih sayang yang diperoleh dari keluarga dapat mengontrol perilaku seseorang. Penanaman nilai-nilai agama juga dapat merubah pola pikir seseorang;

d. Lemahnya keimanan dan nilai religiusitas

---

<sup>65</sup>Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, *Op.cit.*, hlm. 5.

Agama diibaratkan sebagai pengendali perilaku seseorang. Apabila keimanan seseorang itu lemah cenderung menerima nilai-nilai yang sebenarnya berlawanan dalam nilai-nilai agama. Apabila keimanan itu kuat, maka otomatis seseorang tahu mana yang baik menurut agamanya dan mana yang menjadi larangan;

e. Belum siap mempunyai anak atau belum siap menikah

Membuang bayi belum siap menikah. Pernikahan tentu membutuhkan perencanaan. Melahirkan seorang anak tentu mempunyai tanggungjawab besar ke depannya, jalan pintas membuang bayi sendiripun dilakukan;<sup>66</sup>

f. Usia seseorang

Mulai dari usia 16-20 Tahun. Pada umur remaja seperti ini pemikiran mereka masih labil, jadi tidak berpikir panjang tentang apa saja dampak atau akibat yang dialami oleh bayi yang dibuang maupun oleh si ibu pembuang bayi itu sendiri;

g. Takut dikucilkan masyarakat

Faktor masyarakat juga berpengaruh, dikucilkan masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari perzinahan. Membuat ibu menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara agar tidak diketahui oleh masyarakat;

h. Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki tersebut mengkhianati pacarnya dengan cara memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya;

i. Dampak globalisasi

Dampak globalisasi mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, mudahnya mencari informasi apapun di internet, mudahnya berkomunikasi, adanya sosial media. Globalisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif, salah satu dampak negatif globalisasi bisa menimbulkan suatu kejahatan. Seperti berkenalan dengan seseorang di media sosial, bertemu dan tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Banyak tindak pidana yang terjadi yang berawal dari sosial media seperti penipuan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Menurut Erna Dewi, ada 5 (lima) faktor pelaku melakukan kejahatan pembuangan bayi yaitu:<sup>67</sup>

- a. Faktor pergaulan bebas;
- b. Faktor psikologis yaitu kondisi pelaku yang panik setelah melahirkan bayi dari hasil hubungan di luar nikah;
- c. Faktor keluarga, dimana kurangnya perhatian seseorang mengakibatkan melakukan sebuah kejahatan akibat pergaulan yang tidak baik;

---

<sup>67</sup>Berhanundin Bin Abdullah, *Punca Gejala Buang Bayi Dan Penyelesaiannya Dalam Kompilasi Kajian Kanak-Kanak Dan Remaja Di Malaysia*, Ketua Editor Mohamed Fadzil Che Din, Kuala Lumpur: Institusi Sosial Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat, 2010, Hlm. 141.

- d. Faktor lingkungan mempengaruhi hal baik bagi setiap individu di lingkungan tersebut, hal tersebut juga berlaku sebaliknya;
- e. Faktor ekonomi.

Pembuangan bayi banyak berlaku dalam kalangan mereka yang melakukan perbuatan zina suka sama suka antara lelaki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah. Tindakan ini berakibat kepada keluarga untuk menutupi perasaan malu terhadap masyarakat. Ada kemungkinan lain mereka tidak mau memelihara anak yang dilahirkan di luar nikah kerana takut akan mendatangkan bahaya dan kecelakaan dalam keluarga. Beberapa sebab terjadinya pembuangan bayi yakni:<sup>68</sup>

- 1) Perasaan takut dan malu yang dialami oleh perempuan hamil dari hasil hubungan di luar nikah kerana tidak mendapat dukungan keluarga mengenai kehamilannya;
- 2) Perasaan takut dihukum kerana kesalahan kehamilan di luar nikah setelah masyarakat umum mengetahuinya;
- 3) Bayi yang dilahirkan dalam kondisi (cacat) sehingga menjadi beban kepada keluarga dan tidak diterima sepenuhnya;
- 4) Kurangnya pendidikan agama menyebabkan perempuan hamil dari hasil hubungan di luar nikah dengan mengambil jalan mudah tanpa memikirkan akibat dan resikonya;
- 5) Minimnya pengetahuan mengenai edukasi hubungan badan (seks) sesama lawan jenis (perkawinan);

---

<sup>68</sup>Dewan Negara, *Naskhah Draf Dewan Negara Malaysia*, Kuala Lumpur, 29 April 2010, Hlm. 1 - 48.

6) Ayah bayi yang dilahirkan tersebut tidak mau bertanggungjawab dan menghilangkan diri.

Pembuangan bayi merupakan perkataan buang bermaksud (mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan). Perkataan bayi bermakna anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu. Manakala maksud pembuangan bayi merupakan suatu perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke tempat yang tidak manusiawi. Definisi yang diberikan ini mampu memberikan kepahaman lebih jelas lagi tentang masalah pembuangan bayi.

Buang bayi merupakan suatu istilah baru yang disebut sebagai satu perbuatan jahat yang termasuk dalam arti kata gejala sosial. Buang bayi memberi maksud sangat luas dan kurang dibincangkan secara khusus kepada masyarakat seperti yang berlaku sekarang lebih merujuk kepada buang bayi setelah kelahiran saja. Definisi umum diberikan kepada istilah buang bayi kepada perbuatan meninggalkan bayi baru lahir yang masih hidup atau mati di sesuatu tempat dengan sengaja atau berusaha menggugurkan kandungan dengan apa cara sekalipun. Perbuatan ini dilakukan biasanya terhadap anak luar nikah<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup>Jawatankuasa Pembangunan Sosial Terengganu, *Dasar Pembangunan Sosial Terengganu*, Kuala Terengganu: Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Terengganu, 2002, Hlm. 4.

## 2. Tindak Pidana Pembuangan Bayi Menurut Undang-Undang

Pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu kandung dengan cara membuang serta meninggalkan bayinya menjadi fokus penelitian<sup>70</sup>. Terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat dihukum, tiap-tiap perbuatan itu masing-masing dipertanggungjawabkan sendiri. Seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila disamping melakukan pembunuhan, ia juga merupakan pelaku atau peserta dalam perbuatan itu<sup>71</sup>.

Pelaku kejahatan pembuangan bayi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat pada Pasal 76B yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*. Kemudian dijerat pada Pasal 77B yang berbunyi *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.

Selain Pasal tersebut terdapat juga Pasal yang dapat menjerat pelaku pembuangan bayi ancamannya diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

---

<sup>70</sup>R., Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bandung: Politeia, hlm. 223.

<sup>71</sup>Andi Asriadi Hafid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 24.



- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan kejahatan pembuangan bayi juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Juga pada pasal 49 huruf (a) mengatur sanksi yang diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta)”*<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup>Eli Julimas Rahmawati, *Op.cit.*, hlm. 278.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>73</sup>. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak “*fundamental right and freedoms of children*”. Berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>74</sup>.

Perlindungan anak setidaknya memiliki 2 (dua) aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut, mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua mengatakan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

<sup>74</sup>Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Volume 10, Nomor 2, Agustus, 2005.

<sup>75</sup>Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, Makalah dalam Rangka Hari Anak Tahun 2002*, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed, tanggal 31 Januari 2002, hlm. 1.

Anak merupakan mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik) belum dewasa. Nicholas mengatakan bahwa anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa kedewasaan dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain<sup>76</sup>. Pada hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian atau kriteria anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak:<sup>77</sup>

a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan *“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”*;

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45

KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun;

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif,

---

<sup>76</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009, hlm. 36.

<sup>77</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, hlm. 2.

bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu<sup>78</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan kemajuan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Negara menjamin atas hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak<sup>79</sup>.

Berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

---

<sup>78</sup>Hadjon M., Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 2.

<sup>79</sup>Abdul Rahman Saleh, *Panduan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Sentralisme Production, 2006, hlm. 105.

- c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial;
- d. Perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan, penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak melakukan kejahatan dan sebagainya;
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Permasalahan perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas<sup>80</sup>. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>81</sup>. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata. Pemberian perlindungan yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian perlindungan yang bersifat materi

---

<sup>80</sup>Lukman Hakim Nainggolan, *Op.cit.*

<sup>81</sup>Dikdik M., Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan**

#### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan derita, nestapa dan siksaan. Pidana merupakan sanksi yang terdapat dalam hukum pidana, jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana merupakan sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sanksinya berupa pemecatan jabatan, jika dalam hukum perdata sanksinya berupa penggantian kerugian. Sedangkan dalam hukum pidana sanksi berupa pidana yang sangat keras yaitu bisa berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan dan bahkan berupa pidana jiwa<sup>82</sup>.

Menurut Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum "*penitensier*" yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan pidana. Hukum "*penitensier*" juga berisi tentang sistem tindakan "*maatregel stelsel*". Usaha negara dalam menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari pemerkosaan-pemerkosaan terhadap kepentingan umum. Secara represif

---

<sup>82</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 139.

disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan “*maatregelen*”<sup>83</sup>.

Pidana atau hukuman “*straf*” dalam bahasa Belanda atau “*poenali*” dalam bahasa Latin merupakan “*Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana*”<sup>84</sup>. Menurut Soedarto pidana merupakan “*Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*”<sup>85</sup>. Penulis berpendapat bahwa pidana merupakan nestapa (derita) atau perasaan tidak enak yang diberikan oleh negara melalui lembaga berwenang kepada orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana dianut asas praduga tidak bersalah “*presumption of innocence*”, apabila belum diputus oleh hakim secara sah maka orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana haruslah dianggap tidak bersalah.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan sebagai penghukuman<sup>86</sup>. Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusannya kepada orang yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum

---

<sup>83</sup> Andi Asriadi Hafid, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>84</sup> R., Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>85</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang, hlm. 3.

<sup>86</sup> Syafriman, Pengertian Pemidanaan, <http://ilmuhukumusk.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pemidanaan.html>, Diakses 11 November 2019.

pidana saja namun juga hukum perdata, pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, “*ius poenale*” dan “*ius puniendi*”, “*ius poenale*” merupakan pengertian hukum pidana yang objektif.

Hukum pidana merupakan salah satu dari sub sistem hukum yang ada di suatu negara, ada 2 (dua) istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana terdapat beberapa pengertian menurut Van Hamel pidana atau “*straf*” merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>87</sup>.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Hukum pidana materil merupakan sekumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;

---

<sup>87</sup>Mukhlis R., *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, Mei, 2011, hlm. 201.

<sup>88</sup>Laden Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.



b. Hukum pidana formil merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu. Mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini mengenai perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis<sup>89</sup>.

Melihat sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil kongres PBB Tahun 1976 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku Kejahatan. Kongres tersebut menyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku berasal dari hukum asing yang telah usang "*obsolete and unjustice*" serta tidak sesuai dengan kenyataan "*outmoded and unread*". Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak

---

<sup>89</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 2.

berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini<sup>90</sup>.

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya berorientasi pada pelaku, sehingga jika diterapkan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang lain, tidak memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya. Seiring berkembangnya wacana global tentang perlunya pendekatan “*restorative justice*”, maka pendekatan tersebut perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pendekatan “*restorative justice*” memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya. Pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian, korban atau keluarganya memaafkan serta menerima ganti kerugian, dan hubungan ke depan dapat dipulihkan<sup>91</sup>.

Tujuan pemidanaan telah tertuang dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu diantaranya:<sup>92</sup>

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna;

---

<sup>90</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

<sup>91</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qias-Diyat dalam Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2015, hlm 2-3.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana;
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenaan merendahkan martabat.

Penggunaan istilah pidana sebagai sanksi pidana, pengertian yang sama, sering diartikan dengan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberi pidana, dan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana merupakan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Hal ini terdapat beberapa unsur dan ciri-ciri pidana diantaranya yaitu:<sup>93</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan (nestapa) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang;

---

<sup>93</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185-186

d. Pidana merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Doktrin membedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh J.M. Van Bemmelen menjelaskan ada 2 (dua) hal sebagai berikut:<sup>94</sup> *“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah hukum pidana dipergunakan sejak penduduk Jepang di Indonesia untuk pengertian *“strafrecht”* dari bahasa Belanda. Membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *“burgerlijkrecht”* atau *“privaatrecht”* dari bahasa Belanda<sup>95</sup>. Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana sebagai berikut: *“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”*<sup>96</sup>.

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP, akan tetapi wujud dan batas-

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 1.

<sup>96</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, hlm. 9.

batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam hukum pidana yang bersangkutan. Negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tadi. Berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana<sup>97</sup>.

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran ketentuan hukum, meliputi kejadian sehari-hari. Seorang guru yang menghukum muridnya di depan kelas, semuanya itu didasarkan suatu keputusan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Tetapi hukuman dan pidana mempunyai kesamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai "*value*", perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Hukum pidana menurut Mezger memiliki pengertian sebagai berikut: "*Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana*". Definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung 2 (dua) hal yakni perbuatan jahat

---

<sup>97</sup>Andi Asriadi Hafid, *Op.cit.*, hlm. 30.

atau perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut<sup>98</sup>. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain-lainnya semacam Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Agraria, dan sebagainya.

Hukum terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana digolongkan dalam hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan (mengatur kepentingan umum)<sup>99</sup>. Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Fungsi hukum pidana pada umumnya mengatur hidup kemasyarakatan, sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak menciderainya. Perlindungan itu dilakukan dengan adanya sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya<sup>100</sup>.

Masyarakat memiliki pemikiran bahwa orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, dipandang sebagai orang jahat atau orang yang tercela. Pidana tidak hanya rasa tidak enak pada saat dijalani, tetapi sesudah orang menjalaninya masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa pernah berbuat jahat. Cap ini disebut dalam ilmu

---

<sup>98</sup>I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016, hlm. 11.

<sup>99</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 2.

<sup>100</sup>Muchsin, *Op.cit.*, hlm. 60.

pengetahuan disebut (stigma), kalau ini tidak hilang, maka seolah-olah dipidana seumur hidup.

Memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan hal-hal yang memberatkan, menghapuskan, dan meringankan pidana. Putusan itu merupakan hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menyebutkan bahwa: *“Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”*. Alasan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam setiap putusan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diungkapkan:<sup>101</sup>

a. Alasan-Alasan yang Memberatkan Pidana

Dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu:

- 1) Memangku suatu jabatan atau *“ambteljik hodanigheid”* pada Pasal 52 KUHP. *“Bilamana seseorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya, karena jabatannya dapat ditambah sepertiga”*. Pemberatan dalam Pasal 52 terletak pada jabatan, keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri);

---

<sup>101</sup>Andi Asriadi Hafid, *Op.cit.*, hlm. 54.

- 2) Pengulangan atau "*recidivism*" secara umum apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhkan pidana padanya, tetapi dalam jangka waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruh atau sebagian pidana seluruhnya dihapuskan (apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa). Pelaku melakukan tindak pidana yang sama lagi;
- 3) Gabungan atau "*samenloop*" pada Pasal 65 dan 66 KUHP, "*samenloop*" atau "*concursum*" dapat diterjemahkan berarti gabungan atau pembarengan. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan suatu perbuatan, melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Belum dijatuhi putusan hakim atas diri dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.

b. Alasan-Alasan yang Meringankan Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu:<sup>102</sup>

- 1) Percobaan pada Pasal 53 ayat (2) dan (3) "*medeplichtgheid*", pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) percobaan dan pembantuan. Suatu ketentuan umum mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan yang artinya orang yang membantu tidak diwujudkan suatu tindak pidana

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 59.



tertentu. Sehingga ancaman pidana dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan;

- 2) Belum dewasa atau “*minderjarigheid*” pada Pasal 47, tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup. Hakim menjatuhkan pidana berat atau lamanya maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya dikurangi sepertiga. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun:<sup>103</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Untuk itu kewenangan sangat penting, timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak menjatuhkan pidana penderitaan. Sedangkan pengertian pemidanaan menurut Soedarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan merupakan sinonim dengan perkataan tersebut dijatuhi pidana. Tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana<sup>104</sup>.

## 2. Teori Pemidanaan

Menurut Adami Chazawi terdapat banyak teori mengenai pemidanaan, namun dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan “*vergeldings theorien*”;

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>104</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

b. Teori relatif atau teori tujuan “*doel theorien*”;

c. Teori gabungan “*vernegings theorien*”<sup>105</sup>.

Untuk lebih rinci penulis akan menguraikan satu-persatu mengenai teori pembedaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori absolut atau teori pembalasan “*vergeldings theorien*”, penganut dari teori absolut tersebut Immanuel Kant dan Hegel. Immanuel Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral atau etika dan Hegel mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan dan kejahatan merupakan suatu tantangan kepada hukum dan keadilan<sup>106</sup>.

Pembalasan tersebut tidak melihat akibat dari pembedaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana apakah bermanfaat atau malah sebaliknya, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat, yang ditekankan oleh teori itu hanya sebatas pembalasan. Menurut A. Fuad Usfa teori absolut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi kepada pembalasan dendam penjahatnya;
- 2) Teori pembalasan objektif, yang berorientasi kepada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dalam masyarakat<sup>107</sup>.

b. Teori relatif atau teori tujuan “*doel theorien*”, penganut teori relatif tersebut Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “*Hanya dengan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan*

---

<sup>105</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 153.

<sup>106</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 142.

<sup>107</sup>A., Fuad Mustafa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 145.

*penjatuhan pidana kepada si penjahat*”<sup>108</sup>. Menurut teori ini pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana bukanlah hanya sebatas pada pembalasan saja namun haruslah mencapai suatu tujuan yaitu perlindungan bagi masyarakat dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Menurut Erdianto Effendi teori relatif memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu “*Untuk menakuti, untuk melindungi, dan untuk memperbaiki*”<sup>109</sup>. Teori relatif sangat berbeda dengan teori absolut, teori relatif melihat kepada hal-hal yang akan datang dengan maksud mendidik pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi baik kembali;

c. Teori gabungan “*vernegings theorien*”, penganut dari teori gabungan tersebut Binding. Menurut teori gabungan, dasar diberikannya suatu pemidanaan merupakan sebuah gabungan dari teori absolut dan relatif. Pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana namun juga untuk menciptakan tertib dalam masyarakat. Menurut Schravendijk teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 42.

<sup>109</sup>*Ibid.*, hlm. 143.

<sup>110</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 162.

Sesuai dengan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal. Berikut teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek, yaitu:

a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, ajaran ahli-ahli Frenologi mendasarkan pada preposisi dasar:<sup>111</sup>

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak;
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan;
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

b. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para positivistik pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis dan

---

<sup>111</sup>I.S., Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 47.

ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah<sup>112</sup>. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada, maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan mental psikoses, neoroses, dan cacat mental<sup>113</sup>.

Teori psikogenesis (psikologis dan psikiatris) menekankan sebab-sebab tingkah laku kenakalan remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, frustrasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain<sup>114</sup>.

- c. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan<sup>115</sup>. Secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budaya, moral, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan serta struktur yang ada. Mempelajari tindak

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>114</sup>Kartini Kartono, *Patoogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm. 29.

<sup>115</sup>I.S., Susanto, *Op.cit.*, hlm. 72.

penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui dua cara pendekatan yaitu:<sup>116</sup>

- 1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif;
- 2) Penyimpangan sebagai problematika subjektif.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi. Sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:<sup>117</sup>

- 1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen. Teori kelas dapat dipandang sebagai (pendewasaan) teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari di luar pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.
- 2) Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial. Tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>117</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

sebagainya, termasuk dalam teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi. Dapat dikatakan teori ini sudah kuno dibanding dengan teori-teori kelas. Adapun teori-teori yang termasuk teori tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu:<sup>118</sup>

a) Teori ekologis

Teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial yaitu kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, serta daerah kejahatan dan perumahan kumuh;

b) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain bertemunya 2 (dua) budaya besar, budaya besar menguasai budaya kecil, dan apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain;

c) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan perlu diperhatikan

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

beberapa hal, yaitu teknik studi, serta batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran;

d) Teori “*differential association*”

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dapat dipelajari. Menurut Sutherland perilaku kejahatan merupakan perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan<sup>119</sup>. Menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan sembilan proposisi sebagai berikut:<sup>120</sup>

- (a) Perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dapat dipelajari secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi;
- (b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat;
- (c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan;
- (d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang harus dipelajari tersebut meliputi teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenaran dan sikap;

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 108.



- (e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan definisi aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- (f) Seseorang menjadi “*delinkuen*” karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat;
- (g) “*Differential association*” bervariasi dalam frekuensi lamanya, prioritas dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka “*differential association*” bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup;
- (h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;<sup>121</sup>
- (i) Perilaku kejahatan merupakan persyaratan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.

Kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut

---

<sup>121</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkanpun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku. Pembuangan bayi merupakan suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Pelaku dari tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai macam golongan dan dilakukan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Teori-teori yang menyebutkan tentang penyebab suatu kejahatan sangat banyak ditemukan, dimana pendapat satu sama lain saling berbeda. Tetapi secara garis besar teori-teori tersebut mempunyai satu garis besar<sup>122</sup>.

Hukum acara pidana yang mengatur mengenai cara-cara negara dengan aparaturnya dalam mempergunakan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana. Aparatur penegak hukum meliputi kepolisian yang bertugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan; kemudian kejaksaan bertugas dalam hal penuntutan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pengadilan bertugas untuk menjatuhkan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang. Lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Putusan pemidanaan dapat dilakukan bilamana terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah

---

<sup>122</sup>Rifki Firman, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Jurnal Poenale, Volume 3, Nomor 4, 2015, hlm. 3.

melakukannya<sup>123</sup>. Pemidanaan dapat dimaknakan sebagai perbuatan, tindakan, atau putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum maupun khusus di peradilan hukum pidana. Secara teoritis, yuridis maupun empiris, hakim dalam menerapkan sanksi pidana haruslah mengacu pada nilai filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, norma yuridis berintikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Nilai sosiologis dengan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>124</sup>.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting di dalam menentukan dan mewujudkan nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum. Hakim dalam pemeriksaan perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dalam pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi sebelum dibuktikan kebenarannya<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup>Paingot Rambe Manalu, *et al.*, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010, hlm. 171.

<sup>124</sup>Yulizar Gunawan Wibisono, *Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm. 20, t.d.

<sup>125</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 141.

### 3. Jenis-Jenis Pidana

S.R. Sianturi membagi pidana ke dalam beberapa bentuk yaitu:<sup>126</sup>

- a. Pidana jiwa: pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku: pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara "*brandmaerk*", dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu: pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda atau kekayaan: pidana denda, perampasan barang, hingga membayar harga barang yang belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya<sup>127</sup>.

Bentuk-bentuk hukuman sudah tertuang dalam Pasal 10 KUHP, adapun rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 10

- a. Hukuman-hukuman pokok:
  - 1) Hukuman mati;
  - 2) Hukuman penjara;
  - 3) Hukuman kurungan;
  - 4) Hukuman denda.

---

<sup>126</sup>S.R., Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 452.

<sup>127</sup>*Ibid.*

b. Hukuman-hukuman tambahan:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- 2) Perampasan barang yang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

Untuk lebih rinci penulis akan menguraikan jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP di atas sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling berat di dalam KUHP. Pasal dalam KUHP yang ancaman hukuman maksimumnya berupa pidana mati antara lain pasal 104, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2, pasal 140, pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 368 ayat (2), pasal 444, pasal 479 huruf k ayat (2), pasal 479 huruf o ayat ke (2)<sup>128</sup>.

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Sebelum adanya penetapan Presiden ini, pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara digantung hingga mati. Namun setelah adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, maka pidana mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati.

---

<sup>128</sup>Ajeng Gandini, *Ketentuan Hukuman Mati di Indonesia*, <http://hukumanmati.web.id/ketentuan-dan-pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia/> Diakses 13 November 2019.

## 2) Pidana Penjara

Menurut Erdianto Effendi, pidana penjara merupakan pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara<sup>129</sup>. Hukuman pidana penjara terdakwa harus menjalani masa hukumannya di dalam penjara atau di rumah tahanan (rutan). Ketentuan mengenai pidana penjara salah satunya diatur dalam Pasal 12 KUHP, hukuman penjara itu dapat dikenakan seumur hidup atau sementara. Hukuman penjara minimal satu hari dan selama-lamanya adalah 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun bagi kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

## 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara, keringanan ini antara lain:<sup>130</sup>

- a) Para terpidana kurungan mempunyai hak "*pistole*", artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur atas biaya sendiri;
- b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara;
- c) Maksimum ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Maksimum ini boleh sampai 4 (empat) bulan dalam hal terjadi

---

<sup>129</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 146.

<sup>130</sup>*Ibid*, hlm.148.

pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (pasal 18);

- d) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28);
- e) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri<sup>131</sup>.

Pada dasarnya pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, sama-sama merampas kemerdekaan dari narapidana, perbedaannya terletak pada ancaman hukumannya. Kewajiban selama menjalani kurungan, memiliki hak "*pistole*", dan harus terpisah tempatnya dari narapidana pidana penjara. Semua perbedaan itu lebih ringan daripada yang harus dijalani oleh narapidana pidana penjara, dalam KUHP pasal yang mengatur pidana kurungan salah satunya adalah pasal 18.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, maksimumnya sejumlah Rp.0,25 x 15<sup>132</sup>.

##### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. 149-150.

<sup>132</sup>*Ibid.*, hlm.150.

tertentu yaitu perampasan barang tertentu. Pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan sebagai sebuah sanksi pidana, tetapi dapat menambah pidana pokoknya.

#### 1) Pencabutan Hak Tertentu

Hak yang boleh dicabut dengan keputusan hakim diatur dalam Pasal 35 KUHP, hak-hak tersebut antara lain adalah:

- a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- b) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
- c) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang;
- d) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat, wali, curator, baik bagi dirinya maupun orang lain, kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anaknya;
- e) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan (pasal 227).

#### 2) Perampasan Barang Tertentu

Barang-barang yang boleh dirampas dengan keputusan hakim merupakan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja dipakai melakukan kejahatan. Pengaturan mengenai perampasan barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP<sup>133</sup>.

---

<sup>133</sup>*Ibid.*



### Pasal 39

- a) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang;
- c) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya semua putusan hakim sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim. Misalnya melalui surat kabar, radio, ditempelkan di tempat umum dengan biaya yang ditanggung terdakwa<sup>134</sup>. Mengenai pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 128 ayat (3), 206 ayat (2), 361 ayat (1), 395 ayat (1), dan 405 ayat (2) KUHP.

---

<sup>134</sup>R., Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 60.

Jenis-jenis pidana yang disebutkan oleh S.R. Sianturi merupakan jenis-jenis pidana secara keilmuan, namun saat ini tidak semuanya dipergunakan lagi. Semenjak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 maka pidana yang diterapkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP<sup>135</sup>.

---

<sup>135</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penindakan Kejahatan Pembuangan Bayi**

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ada 4 (empat) bagian pokok kewajiban orang tua, antara lain perlindungan di bidang agama, pendidikan, sosial serta kesehatan anak. Pada Pasal 25 kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak<sup>136</sup>.

Instrumen hukum mengenai kejahatan pembuangan bayi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat

---

<sup>136</sup>Rifki Firman, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Jurnal Poenale, Volume 3, Nomor 4, 2015, hlm. 1.

manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas<sup>137</sup>.

Instrumen hukum di luar KUHP yang mengatur kejahatan pembuangan bayi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan Undang-Undang tersebut tentang Perbuatan Penelantaran Anak dapat dikenakan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>138</sup>. Perbuatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian dilakukan oleh orang tuanya (ibu). Hal ini dapat masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. Terdapat pula pada Pasal 49 huruf (a) yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana*

---

<sup>137</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3.

<sup>138</sup>Rifki Firman, *Op.cit.*, hlm. 29.

*dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)''.*

Ada 3 (tiga) instrumen hukum yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana yang terdapat dalam 3 (tiga) instrumen tersebut merupakan penindakan hukumnya. Secara garis besar Konvensi Tentang Hak Anak merupakan instrumen paling komprehensif yang berlaku untuk saat ini, setidaknya terdapat 4 (empat) poin utama dalam Konvensi Hak Anak tersebut antara lain:<sup>139</sup>

1. Non diskriminasi (Pasal 2);
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
4. Pandangan anak.

Selain itu mengenai instrumen hukum yang mengatur mengenai kejahatan pembuangan bayi dalam perspektif penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan hukum pidana sebelum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur kejahatan pembuangan bayi. Pelaku kejahatan pembuangan bayi masih dikenakan

---

<sup>139</sup>Airlangga Justitia, *Op.cit.*, hlm. 33.

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum<sup>140</sup>. Maka penerapan pemidanaan terhadap penindakan kejahatan pembuangan bayi diancam dan dijera dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan pembuangan anak termasuk bayi. Untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban atau pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pengaturan hukum terkait kejahatan pembuangan bayi terdapat dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa instrumen hukum tersebut mengatur mengenai norma pidananya begitupula mengenai sanksi pidana yang diatur secara berbeda-beda. Namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku pembuangan bayi atau anak terdapat dalam ketentuan Pasal 77B.

---

<sup>140</sup>Airlangga Justitia, *Op.cit.*, hlm. 31.

Pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan menyebabkan kematian bagi anak tersebut dapat pula disebut sebagai pembunuhan bayi "*infanticide*". Istilah hukum yang menggambarkan tentang pembunuhan anak dengan usia di bawah 1 (satu) tahun oleh ibu si anak. Sedangkan menurut "*Infanticide Act*" (1938), "*Article I*" (London) dimana seorang wanita dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas anaknya yang berumur di bawah 12 (dua belas) bulan. Namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi, didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran bayinya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tanpa perkecualian<sup>141</sup>.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini pembunuhan terhadap anak khususnya bayi. Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yakni: adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain) dan adanya hubungan sebab dan akibat "*casual verband*" antara perbuatan dan akibat kematian orang lain<sup>142</sup>. Menghilangkan nyawa secara berencana bagi anak atau bayi "*kindermoord*". Beberapa pendapat mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan bukan karena bentuk kesengajaannya, tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau "*opzet*" yang mencakup 3 (tiga) syarat antara lain:<sup>143</sup>

1. "*Opzet*" nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;

---

<sup>141</sup>Hadidjah S., *Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Tesis, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 252, t.d.

<sup>142</sup>Lamintang P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh yang Membahayakan bagi Tubuh, Nyawa*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 95.

<sup>143</sup>Sianturi S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya*, Bandung: Alumni, hlm. 64.

2. Setelah orang merencanakan “*opzet*”, maka yang penting cara “*opzet*” tersebut dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang;
3. Pada umumnya merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Berbagai hal yang terjadi mengenai pembuangan bayi menyebabkan matinya anak ini dilakukan dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa dan dapat dikatakan dilakukan dengan keadaan yang sangat cepat dalam pelaksanaannya. Menurut Andi Hamzah hal ini tidak menghilangkan unsur berencana itu sendiri, Andi Hamzah berpendapat bahwa unsur berencana itu ketika adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan yang diambil dalam hati itu sekejap saja dengan pelaksanaannya<sup>144</sup>. Putusan Hoge Raad pada tanggal 2 Desember Tahun 1940, N.J. (1941) Nomor 293 menyatakan “*Dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya Pasal 340 KUHP. Hal ini mengenai kejahatan pembuangan bayi yang menyebabkan matinya anak diatur pula dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP.

Pasal 341 KUHP mengatakan bahwa “*Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*”. Rumusan Pasal 341 KUHP itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>144</sup>Koeswadji, H.H., *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Widjaya, hlm. 41.



### 1. Unsur Objektif

- a. Pelaku adalah seorang ibu;
- b. Perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain;
- c. Objeknya nyawa bayinya sendiri;
- d. Waktunya pada saat bayi tersebut dilahirkan;
- e. Motifnya karena takut diketahui telah melahirkan.

### 2. Unsur Subjektif

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu ditunjukkan yakni:

- a. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
- b. Nyawa bayinya sendiri;
- c. Waktunya saat bayi dilahirkan, dan tidak lama setelah bayi dilahirkan.

Kesengajaan yang demikian bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Perbuatan diketahui ketika saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan<sup>145</sup>.

Pembunuhan bayi berencana "*kindermoord*" tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Pelaku adalah seorang ibu kandungnya;
- 2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- 3. Perbuatannya menghilangkan nyawa;

---

<sup>145</sup>Mangare P., *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya* (Menurut Pasal 134 KUHP), Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume IV, Nomor 2, 2016, hlm. 89.

4. Objek nyawa bayi kandungannya sendiri;
5. Waktu pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan.

Konsep perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran pada teori ini merupakan masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari aspek yuridisnya<sup>146</sup>. Masyarakat tersebut salah satunya anak (bayi). Perlindungan hukum dalam hal ini lebih mengarah kepada salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai dalam tataran berbangsa dan bernegara yaitu keadilan.

Kejahatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi humanisme manusia. Suatu perbuatan yang menurut aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan dilarang, dinamakan perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil<sup>147</sup>.

Negara juga mengatur terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pada dasarnya dalam suatu negara, bayi merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua sehingga setiap anak mempunyai keistimewaan

---

<sup>146</sup>Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 259.

<sup>147</sup>Saleh R., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 13.

tersendiri. Negara bahkan menegaskan bahwa keberadaan anak merupakan anugerah tersendiri bagi orang tua sehingga para orang tua tidak boleh berusaha menghilangkan nyawa anaknya karena takut miskin hanya karena adanya anak<sup>148</sup>.

## **B. Kebijakan Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Pembuangan Bayi**

Soedarto mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan melalui 3 (tiga) tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif<sup>149</sup>. Adapun upaya penanggulangan kejahatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang termasuk dalam bagian dari politik kriminal, politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas<sup>150</sup>. Pengertian dalam arti sempit politik kriminal sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum. Sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.

---

<sup>148</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 35.

<sup>149</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 113-116.

<sup>150</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana (hukum pidana). Kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

2. Upaya Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Hal-hal yang termasuk tindakan represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Upaya Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan<sup>151</sup>. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan<sup>152</sup>.

Menurut Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan terdapat beberapa upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi antara lain sebagai berikut:<sup>153</sup>

#### 1. Upaya Preventif

- a. Menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang;
- b. Memberikan pendidikan formal yang akan menambah dan memperluas wawasan berpikir seseorang;
- c. Memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat;
- d. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau "*free sex*". Menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama perempuan. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dengan masyarakat juga dapat mencegah terjadinya kejahatan pembuangan bayi;
- e. Memberikan lapangan kerja, upaya ini penting mengingat adanya kasus pembuangan bayi yang dilatarbelakangi oleh faktor perekonomian yang lemah. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah

---

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, *Op.cit.*, hlm. 8.

dapat menekan dan mencegah terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberikan tunjangan hidup bagi mereka, memberikan keringanan biaya rumah sakit bagi seorang ibu yang melahirkan dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, jadi mereka tidak akan meninggalkan bayi mereka di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

- f. Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting terhadaparganya yang tinggal 1 (satu) rumah (kumpul kebo) tanpa terikat perkawinan. Hal tersebut perlu diberantas dan dicegah oleh masyarakat karena kehidupan (kumpul kebo) juga semakin marak terjadi di Indonesia. Kesadaran serta kerjasama dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pembuangan bayi.

## 2. Upaya Represif

Menegakkan regulasi yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi. Regulasi tersebut terdapat dalam:<sup>154</sup>

- a. Pasal 304, 305, 306, 307, dan 308 KUHP;
- b. Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Pasal 9 Ayat (1) dan 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>154</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

Adapun hambatan upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi antara lain sebagai berikut:<sup>155</sup>

1. Hambatan Upaya Preventif

Masyarakat memiliki pemikiran sempit dan tidak mau berkembang. Walaupun sudah ada penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan dampaknya serta penyuluhan hukum lain. Pemikiran seseorang yang tetap melakukan hal menurutnya benar meskipun menurut hukum itu salah.

2. Hambatan Upaya Represif

Polisi sulit menemukan tersangka karena terkadang seseorang yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembunyikan kehamilannya dari keluarga, teman, maupun masyarakat. Polisi sulit menemukan tersangka apabila pembuangan bayi tidak berada di sekitar wilayah tersangka tinggal, mungkin dibuang di wilayah yang jauh. Upaya pembuktian di Pengadilan, kesulitan untuk menentukan Pasal mana yang akan dijatuhkan karena sebagian mayat bayi yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak atau membusuk sehingga tidak bisa dilakukan autopsi untuk mengetahui mengapa bayi yang dibuang tersebut mati.

Berdasarkan pendapat di atas maka kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni melalui jalur penal dan non penal antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

---

<sup>155</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Kebijakan penanggulangan melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan pembuangan bayi terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan pembuangan bayi sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi<sup>156</sup>.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana “*penal policy, criminal policy*”, atau “*strafrechtspolitik*” merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>157</sup>

- a. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pembuangan bayi dengan hukum pidana sesuai ketentuan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

---

<sup>156</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

<sup>157</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 390.



Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui upaya penal (pidana) bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkal atau “*deterrent effect*”. Kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui upaya penal (pidana) tetap diperlukan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan dan kebencian sosial sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”<sup>158</sup>.

Senada juga disampaikan oleh Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:<sup>159</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai. Tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing masing;

---

<sup>158</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

<sup>159</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 153.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum. Selain itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat. Tetapi juga untuk mempengaruhi orang (masyarakat) yang tidak jahat untuk menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pembuangan bayi masih sangat diperlukan pada saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif. Mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan kejahatan<sup>160</sup>.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Meliputi

---

<sup>160</sup>*Ibid.*

masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan<sup>161</sup>.

Kebijakan penanggulangan melalui non-penal “*non-penal policy*” merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya<sup>162</sup>.

Kebijakan penanggulangan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan pembuangan bayi. Kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal<sup>163</sup>.

Mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Politik kriminal secara makro dan global merupakan upaya-upaya

---

<sup>161</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>162</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 159.

<sup>163</sup>*Ibid.*

non-penal yang menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” menegaskan bahwa upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan<sup>164</sup>.

Kebijakan penanggulangan melalui jalur non-penal dapat pula diganti dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dikenal dengan istilah “*technoprevention*” dan pemanfaatan potensi efek-preventif aparat penegak hukum. Sudarto mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu (terus-menerus) termasuk melalui jalur non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelanggar hukum potensial. Kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai jalur non-penal yang perlu diefektifkan<sup>165</sup>.

Menekankan bahwa kebijakan penanggulangan melalui jalur non-penal yang paling strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan immateril dari faktor-faktor kriminogen sebab-sebab terjadinya kejahatan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap kejahatan

---

<sup>164</sup>M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

<sup>165</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 48.

pembuangan bayi. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Naawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan pembuangan bayi dapat ditempuh dengan cara:<sup>166</sup>

- a. Penerapan hukum pidana “*criminal law application*”;
- b. Pencegahan tanpa pidana “*prevention without punishment*”;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa “*influencing views of society on crime and punishment/mass media*”.

Penggunaan kebijakan penanggulangan melalui jalur penal (sanksi atau hukum pidana) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan kepolisian. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait kejahatan penelantaran bayi yaitu:<sup>167</sup>

1. Memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, terutama kejahatan pembuangan bayi;
2. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan pembuangan bayi dari sudut pandang keagamaan, disini peran tokoh agama sangat vital untuk menasehati semua individu agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa berujung kepada dilakukannya perbuatan kejahatan pembuangan bayi;

---

<sup>166</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>167</sup>Wawancara dengan Pudji Hariati, Kanit PPA Satreskrim Polres Brebes, pada tanggal 04 November 2019.

3. Menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan, masyarakat memiliki sanksi sosial tersendiri di luar sanksi hukum yang berlaku. Sanksi sosial tersebut tidak hanya menghukum kepada pelakunya tetapi dapat juga berimbas terhadap keluarganya yang diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjelaskan sanksi khusus yang diatur pada Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara khusus bentuk-bentuk perlindungan yang wajib didapatkan oleh anak-anak bahkan termasuk bayi yang baru dilahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber<sup>168</sup>, penulis menganalisis bahwa kebijakan penanggulangan yang ada sudah cukup baik. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dan pembinaan antara masyarakat dengan pihak kepolisian, masyarakat diajak untuk dapat berperan secara aktif melakukan pengawasan, pencegahan, penangkalan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Penanggulangan kejahatan pembuangan bayi dapat diupayakan dari peran aktif orang tua untuk selalu mengajarkan dan membimbing anaknya untuk menjauhi perilaku tercela dengan lebih menekankan pada pengetahuan agama. Agama memiliki ajaran-ajaran yang mampu mengendalikan tingkah laku, dalam kehidupan sosial masyarakat berperan memberikan nasehat untuk senantiasa memaknai nilai-nilai moral yang ada dan berkembang dalam masyarakat<sup>169</sup>.

---

<sup>168</sup>*Ibid.*

<sup>169</sup>*Ibid.*

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri atas 3 (tiga) komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Menurutnya, bahwa “*Penal Policy*” merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis. Memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang. Tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat “*social defence*” dan upaya mencapai kesejahteraan “*social welfare*”<sup>170</sup>. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan “*criminal policy*” merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, kebijakan penegakan hukum bagian dari kebijakan sosial dan bagian dari kebijakan legislatif. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

---

<sup>170</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

Zakkeus P. Doloksaribu mengatakan faktor pendorong terjadinya pembuangan bayi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:<sup>171</sup>

#### 1. Faktor Internal

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK). Faktor internal merupakan faktor yang menyangkut kepribadian dari pelaku yang menyebabkan mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila pembuangan bayi acap sekali terjadi secara turun temurun, sebab anak-anak akan belajar bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.

Apabila pembuangan bayi mewarnai kehidupan sebuah keluarga. Kemungkinan besar mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan anak memiliki kemampuan untuk meniru kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka sehingga pembuangan bayi merupakan hal yang wajar bagi mereka ketika mereka nantinya akan menikah atau berkeluarga. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap anak (bayi).

---

<sup>171</sup>Zakkeus P., Doloksaribu, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Kasus Penelantaran Rumah Tangga*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 8.



Hendra Akhdhiat mengatakan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap anak merupakan kondisi psikis dan kepribadian perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut antara lain:<sup>172</sup>

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai suatu sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang-tua).

Faktor internal terjadinya pembuangan bayi juga dapat disebabkan karena adanya stress yang berkepanjangan disebabkan oleh pengangguran, kecemburuan, kemiskinan, tidak memiliki rasa kepuasan dalam memperoleh sesuatu ataupun rasa minder yang berlebihan "*low self esteem*". Sifat emosional tidak mampu mengendalikan dirinya, pecandu alkohol, minuman keras dan mereka yang berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis "*broken home*". Ada juga pendapat yang agak objektif dari "*feminist*" yang mencoba menganalisa lebih jauh bisa juga terjadi karena kondisi perempuan itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan perempuan yang rendah, tidak

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

memiliki usaha yang produktif atau tidak ada “*income*” untuk menunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan yang tidak mempunyai penghasilan tetap dianggap sebagai benalu dalam rumah tangga sehingga laki-laki merasa superior dalam mengendalikan keluarga<sup>173</sup>.

Selain itu ada juga hal lain yang juga berpotensi untuk memicu munculnya pembuangan bayi. Unsur yang menyebabkannya pun berasal dari lingkup keluarga itu sendiri. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya pembuangan bayi antara lain suami istri terjadi dominasi antar pasangan, bisa sang suami atau istri yang dominan. Maksudnya jika terjadi suatu perselisihan pendapat yang terjadi penyelesaian sepihak (kalah-menang) dan bukan penyelesaian yang baik (menang-menang).

Adanya sikap acuh atau tidak mau tahu terhadap apa yang dirasakan atau dialami pasangan, adanya sikap egosentris yang menonjol, tidak adanya kesatuan nilai dalam keluarga atau inkonsistensi apa yang boleh dan yang tidak boleh. Antara orang tua dan anak terkait pengalihan tanggungjawab sebagai orang tua, baik kepada pembantu rumah tangga, baby sitter, sekolah atau keluarga yang lain. Sikap dari orang tua yang berlebihan atau tidak pada porsinya, misalkan terlalu melindungi, terlalu bebas, terlalu keras bahkan ambisi orang tua yang dibebankan pada anak. Banyaknya kata-kata negatif yang diucapkan orang tua kepada anak, kurangnya waktu berkumpul

---

<sup>173</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

antara orang tua dan anak, sehingga anak kekurangan kenangan indah akan orang tuanya<sup>174</sup>.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor di luar diri si pelaku kekerasan, mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti “*stereotype*” bahwa laki-laki merupakan tokoh yang dominan, tegar dan agresif, adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terkhusus dalam kasus pembuangan bayi. Kebanyakan istri menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarga karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Selain hal-hal yang disebutkan, pembuangan bayi juga dapat terjadi karena adanya faktor pemicu atau pendorong yang akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:<sup>175</sup>

### a. Masalah perekonomian

Uang sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi

---

<sup>174</sup>*Ibid.*

<sup>175</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

mencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (PHK), ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, pemicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan;

b. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri merupakan masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh;<sup>176</sup>

c. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua;

Pembuangan bayi kebanyakan dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan biasanya dilakukan setelah proses melahirkan. Sebagian besar melakukan hal tersebut karena merasa takut dan khawatir diketahui oleh orang lain bahwa dirinya sedang mengandung dan melahirkan seorang anak. Kejahatan yang

---

<sup>176</sup>*Ibid.*

dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tanpa sebab yang bersifat khusus “*secreetfactors*”<sup>177</sup>. Pembuangan anak yang baru dilahirkan cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban pikiran psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya, dan juga masalah lingkungan sosial.

Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pembuangan bayi yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kejahatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan ini, para laki-laki yang sebenarnya (turut serta) dalam proses pembuahan dan kehamilan, selalu lolos dari jerat hukum, atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggungjawab dari perbuatan tersebut<sup>178</sup>.

Pembuangan bayi merupakan salah satu bentuk kekerasan karena menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku baginya. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembuangan bayi salah satunya dengan kesenjangan kekuasaan antara suami dan istri di dalam keluarga. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa persoalan

---

<sup>177</sup>Sumiyanto, *Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya Sendiri*, Malang: Laporan Hasil Penelitian Universitas Brawijaya, 2000, hlm. 24.

<sup>178</sup>Rahardjo S., *Polri Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 45.

rumah tangga merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan. Masyarakat tidak melihat pembuangan bayi menjadi tanggungjawab bersama tetapi diposisikan sebagai masalah pribadi yang selalu diselesaikan secara kekeluargaan<sup>179</sup>.

Selain itu sulitnya menemukan informasi praktis yang memberikan gambaran mengenai hak-hak individu dalam rumah tangga menyebabkan kejahatan pembuangan bayi selalu mendapatkan penanganan hukum yang tidak tuntas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi melihat implementasi saat ini pemenuhan hak-hak korban pembuangan bayi masih jauh dari yang diharapkan.

Perlu adanya upaya lain selain dari kebijakan penanggulangan melalui jalur penal seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial masyarakat dan sebagainya. Pembuangan bayi merupakan hal yang lama di tengah masyarakat terlebih lagi kejahatan pembuangan bayi sudah acap sekali terdengar di masyarakat atau di media sosial. Namun hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan pembuangan bayi sering sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan<sup>180</sup>.

---

<sup>179</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>180</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuangan bayi hingga menyebabkan mati dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP. Hal ini terdapat perbedaan yang sangat tipis mengenai penelantaran anak yang baru dilahirkan dengan pembuangan bayi hingga mengakibatkan kematian. Penelantaran anak yang menyebabkan matinya anak tidak ada niat dari pelaku untuk membunuh anak yang dilahirkannya tersebut, berbeda dengan pembuangan bayi dimana pelaku memang sengaja membunuh anak yang baru dilahirkan tersebut. Pemidanaan selama ini dalam persidangan kejahatan pembuangan bayi yang berujung hingga kematian hanya terfokus pada KUHP dan peraturan perundangan-undangan lain dengan pemidanaan yang tidak terlalu berat;
2. Kebijakan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pembuangan bayi melalui jalur penal dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hingga saat ini praktis instrumen hukum yang mengatur mengenai bayi belumlah dibuat, sehingga masih merujuk pada KUHP dan peraturan perundang-undangan

lain yang terkait dengan anak-anak. Karena konsep bayi dan anak-anak memiliki persamaan yakni belum dewasa dan cakap hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya peraturan khusus di luar KUHP mengenai kejahatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan oleh orang tuanya. Karena selama ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai hal tersebut. Agar tidak lagi terjadi kekosongan hukum "*vacuum of norm*)";
2. Kepada penegak hukum pemeriksa perkara kejahatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian dapat bertindak lebih tegas kepada pelaku kejahatan dengan mencoba tidak hanya menerapkan ketentuan hukum dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar hukum pemidanaan. Selain itu karena pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Maka penegak hukum pemeriksa perkara tindak pidana pembuangan bayi dapat menjatuhkan pemidanaan yang berat bagi para pelaku tindak pidana tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dzajuli, A., *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, A'an, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- H.H., Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Widjaya.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan Sekarang*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, Kartini, *Patoogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M., Arief Mansur, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Manalu, Paingot Rambe, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009.
- Marpaung, Laden, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertha, I Ketut, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Mustafa, Fuad A., *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- P.A.F., Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh yang Membahayakan bagi Tubuh, Nyawa*, Bandung: Bina Cipta.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- R., Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru Jakarta.
- Royyan, Abdullah, *Asuhan Keperawatan Klien Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rubai, Masruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- S., Rahardjo, *Polri Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002.
- S.R., Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Bandung: Alumni.

- Saleh, Abdul Rahman, *Panduan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Sentralisme Production, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016.
- Sastrawidjaja, Sofyan, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Armico.
- Sianturi, S.R., Kanter E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem Petehaem.
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bandung, Politeia.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Alumni, 2006.
- Sumiyanto, *Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya Sendiri*, Malang: Laporan Hasil Penelitian Universitas Brawijaya, 2000.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Terengganu, Jawatankuasa Pembangunan Sosial, *Dasar Pembangunan Sosial Terengganu*, Kuala Terengganu: Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Terengganu, 2002.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Universitas Pancasakti Tegal, Tim Penulis Fakultas Hukum, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2019.
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surakarta: Pustaka Tinta Emes.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

\_\_\_\_\_, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainal Andi, Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

Abdullah, Berhanundin Bin, *Punca Gejala Buang Bayi dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Kajian Kanak-Kanak dan Remaja di Malaysia*, Ketua Editor Mohamed Fadzil Che Din, Kuala Lumpur: Institusi Sosial Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2010.

Ayu, Herdian, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Dewan Negara, *Naskah Draf Dewan Negara Malaysia*, Kuala Lumpur, 29 April 2010.

Doloksaribu, Zakkeus P., *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Kasus Penelantaran Rumah Tangga*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

Fahran, *Pelantaran Terhadap Anak, (Prefektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Program Studi Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Firman, Rifki, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Jurnal Poenale, Volume 3, Nomor 4, 2015.

Hadjon, Philipus, M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hafid, Andi Asriadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

- Hamzani, Achmad Irwan, *Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qias-Diyat dalam Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2015.
- Hesky J. Runtuwene, *Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen, Volume V, Nomor 2, Februari, 2016.
- HS., Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Julimas, Eli, *Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Justicia, Airlangga, *Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*, UBELAJ: Universitas Airlangga, 2018.
- Nainggolan, Lukman Hakim, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, 2005.
- Napitupulu, Tom Fernando, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- P., Mangare, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume IV, Nomor 2, 2016.
- R., Mukhlis, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan*, Pekanbaru: Jurnal Ilmu Hukum, 2011.
- Ramadhani, Dimas Arief, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung*, Semarang: Unissula, 2019.
- S., Hadidjah, *Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Tesis, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- S., Wahyudi, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002.

Wibisono, Yulizar Gunawan, *Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

### **D. Artikel/Website**

Gandini, Ajeng, *Ketentuan dan Proses Hukuman Mati di Indonesia*, <http://hukumanmati.web.id/ketentuan-dan-pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia/> Diakses 13 November 2019.

<http://ilmuhukumusk.blogspot.co.id/2013/06/pengertianpemidanaan.ml>.

<https://www.artikata.com/arti-360379-membuang.html>.

<https://www.artikata.com/arti-360391-pembuangan.html>.

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adjie Santanu  
NPM : 5116500011  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 13 April 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Desa Pekauman Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Pekauman	2003	2009
2	SMP Negeri 2 Losari	2009	2012
3	SMA Negeri 1 Losari	2012	2015
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 20 Januari 2020

Hormat Saya



Adjie Santanu





**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan  
Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

### Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
  - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j. pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k. pemberian advokasi sosial;
  - l. pemberian kehidupan pribadi;
  - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - n. pemberian pendidikan;
  - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

#### Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

b. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XA

#### KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

#### Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
  - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
  - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
  - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
  - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
  - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIA

#### LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

#### Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

#### Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

#### Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

#### Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

#### Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

#### Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

#### Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

#### Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77 B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

#### Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

#### Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

#### Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

#### Angka 3

##### Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



**P U T U S A N**

**Nomor 268/Pid.Sus-Anak/2014/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEYTA YULIKE BINTI AZHARI
2. Tempat lahir : Macang Manis
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 07 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ponpes Modern AL-IKHLAS Jalan  
Yos Sudarso  
No.86 RT 02 Kelurahan Watervang Kecamatan  
Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas VIII Ponpes Modern AL-  
IKHLAS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Maret 2014 No.Pol : SP.Han/04/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014, No. 124/N.6.16/Euh.1/03/2014 tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 06 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 , No.PRINT – 85/T-7/ Euh.2/04/2014, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 April 2014 Nomor :Pen.Pid/An/2014/PN.Llg sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid/AN/2014/PN.Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 15 April 2014 Nomor : 268/Pid.AN/2014/PN.Llg ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fauzi Ariyanto, SH beralamat di Jalan Kelapa No. 23 RT 01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 14/PEN/PID/2014/PN.Llg tanggal 15 April 2014;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya yaitu ibunya yang bernama Dahlia;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 268/Pen.Pid/AN/2014/PN.Llg tanggal 07 April 2014 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim 268/Pen.Pid/AN/2014/PN.Llg tanggal 07 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dennda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju kaos, lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih pada bagian depan ada gambar jam dan seorang perempuan serta ada noda darahnya;
- Tanktop dengan garis-garis warna hitam dan putih ;
- Rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna hijau yang ada bercak darahnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menjatuhkan putusan yang sering-ringannya atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 di kebun pisang di Jalan Junaidi, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak ( bayi terdakwa) yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

-----Pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa (yang masih berumur 13 tahun, lahir pada tanggal 7 Mei 2000, berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talang Padang.Kabupaten Empat Lawang) merasakan sakit perut dan mengira bahwa akan Buang Air Besar (BAB) ialu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kamar mandi dan langsung BAB, lalu setelah BAB perut terdakwa masih saja terasa sakit dan dari dalam perut ada yang bergerak dan tak lama kemudian ada air yang keluar dari kemaluan terdakwa dan saat itu perut terdakwa tambah sakit kemudian terdakwa merasakan bahwa terdakwa akan melahirkan sehingga saat itu juga terdakwa diam-diam tanpa seijin Kepala PonPes langsung keluar dari pondok pesantren tersebut dengan tersendat-sendat agar tidak diketahui oleh guru maupun teman-teman terdakwa lainnya, lalu terdakwa berjalan menuju ke jalan Junaidi Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dan saat diperjalanan terdakwa merasakan ada yang akan keluar dari kemaluan terdakwa dan terdakwa merasakan seperti hendak mendedan lalu terdakwa berhenti disamping tempat sampah dan duduk ditanah kemudian terdakwapun mendedan sebanyak 2 (dua) kali dan disaat mendedan yang kedua kali tersebut lahirlah seorang bayi perempuan dari Rahim terdakwa yang dalam keadaan menangis lalu oleh terdakwa bayi tersebut ditelentangkannya kemudian tali dipusatnya yang menyambung dengan perut terdakwa langsung diputuskannya dengan cara menariknya kuat-kuat dan beberapa saat kemudian tanpa terdakwa ketahui dari kemaluan terdakwa keluar segumpal yang menyerupai daging serta darah (ari-ari) lalu terdakwa memegang tali dan segumpal daging (ari-ari) dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menggendong bayi terdakwa dan terdakwa terus berjalan sambil berpikir untuk membuang bayi tersebut dan ketika terdakwa sampai di dekat plang bertuliskan "Kantor Lurah Watervang" terdakwa yang tidak menginginkan bayi terdakwa langsung meletakkan bayi tersebut ditanah dibawah pohon pisang yang jaraknya  $\pm 3$  (tiga) meter dari pinggir jalan dengan keadaan telanjang. Kemudian terdakwapun pergi meninggalkan bayi terdakwa seorang diri dan dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat kolam lalu terdakwa buang ari-ari tersebut didalam kolam lalu terdakwa pergi ke arah pasar terminal atas. namun sebelum sampai di Pasar terminal terdakwa bertemu dengan saksi Syah Rony Abdullah dan oleh saksi Syah Rony Abdullah yang sebelumnya sudah melihat terdakwa sambil menggendong bayi menanyakan kepada terdakwa "dimana bayinya? dan dijawab terdakwa "dititipkan dirumah tante " kemudian terdakwapun bergegas pergi meninggalkan saksi Rony Abdullah menuju ke Pasar dan disesampainya terdakwa di Pasar. terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKI, lalu OKI bertanya kepada terdakwa "nak kemano" lalu dijawab terdakwa "nak balek kesekolah aku" lalu OKI bertanya "ngapo kau **pake** handuk" lalu dijawab terdakwa "aku minggat" dan ditanya lagi oleh OKI "ngapo kau bhrdarah galo" lalu dijawab terdakwa "aku lagi mensturasi" lalu terdakwaupun dibawa OKI kerumah temannya didaerah Tanjung Indah dan ditempat itu ibu dari teman Oki menyuruh terdakwa untuk mandi lalu mengganti baju dan celana, dan saat itu karena kelelahan habis melahirkan terdakwaupun tertidur dan sekira jam 11.00 wib terdakwa disuruh makan lalu sekitar jam 11.30 wib terdakwa diantar OKI ke Pondok Pesantren dengan menggunakan ojek dan ternyata di pondok pesantren tersebut sudah ada polisi kemudian terdakwaupun dibawa ke Rumah Sakit Sobirin untuk mendapatkan perawatan dan kemudian di proses secara hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf b UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syah Ronny Abdullah Bin Aba Soni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.30 wib di kebun pisang Jalan Kelurahan Rt 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau saksi mendengar ada anjing menggonggong lalu saksi mengintip dari dalam rumah saksi dan terlihat terdakwa dengan seorang laki-laki berbincang-bincang namun saksi tidak jelas apa yang diperbincangkan antara terdakwa dengan laki-laki tersebut namun saksi mendengar sepintas laki-laki tersebut bicara kepada terdakwa "jangan kemana-mana tunggu saja disini", dan kemudian laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa kemudian saksi penasaran dengan terdakwa sehingga saksi langsung memakai baju dan keluar mencari terdakwa yang berjalan menuju ke jalan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid/AN/2014/PN.Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, dan ketika hendak mengejar terdakwa, saksi bertemu dengan saksi Endik dan bertanya kepada Endik "hendak kemana dan dijawab Endik hendak mengejar perempuan yang membawa bayi, lalu saksi bersama-sama Endik bersama teman Endik dengan menggunakan sepeda motor menyusuri jalan Junaidi tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi, Endik dan temannya tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi berbalik lagi dan disaat itulah saksi bertemu dengan terdakwa dengan keadaan rok penuh dengan darah, lalu saksi berkata "kamu letakan dimana bayi tadi dan dijawab terdakwa "titip di rumah tante terdakwa", namun saksi tidak percaya dengan omongan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan terdakwa kalau bayi tersebut telah dibuangnya ;
- Bahwa saksi sempat menyarankan kepada terdakwa agar bayi kamu diambil saja dan kita bawa ke rumah sakit, namun terdakwa menjawab bahwa tidak usah karena takut nanti ketahuan keluarga terdakwa, sehingga saksi semakin curiga dengan kata-kata terdakwa tersebut dan yakin kalau terdakwa telah membuang bayinya ;
- Bahwa pada saat ngobrol dengan terdakwa tersebut saksi melihat kaki terdakwa penuh dengan tanah ;
- Bahwa kemudian Endik bertanya kepada terdakwa orang mana dan dijawab terdakwa orang Lahat ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi, Endik maupun teman Endik, dan ketika terdakwa pergi saksi bertemu dengan saksi Muhamad Takin dan menanyakan juga tentang terdakwa yang membawa bayi dalam keadaan yang masih berdarah, dan dijawab saksi bahwa terdakwa sudah pergi dan tidak membawa bayinya, sehingga saksi, Endik dan Takin serta teman Endik langsung masuk ke Jalan Junaidi untuk mencari bayi yang dibawa terdakwa sebelumnya dan setelah lama mencari, saksi menemukan bayi tersebut dibawah pohon pisang dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa saksi hampir saja menginjak bayi tersebut karena keadaannya masih gelap dan saat ditemukan bayi tersebut dalam keadaan menangis dan yang meneriaki bahwa itu bayinya awas jangan terinjak adalah "saksi Takin" dan langsung saksi menyuruh saksi Takin untuk membuka bajunya kemudian saksi membungkus bayi tersebut dengan bajunya saksi Takin dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa bayi tersebut ke warga setempat dan oleh warga tersebut diberikan madu, kain dan kemudian diadzankan ;

- Bahwa benar lalu oleh teman Endik yang bernama Yayan mengusulkan untuk dibawa ke tantenya yang kebetulan berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa kemudian saksi, Endik dan Muhamad Takin dan Yayan membawa bayi tersebut ke Bidan Elpina di Jalan Kemang II Rt05 No 22, Kelurahan Watervang untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar anjing menggonggong lalu terjadi percakapan antara terdakwa dengan seorang laki-laki, saksi sudah melihat terdakwa dalam posisi menggendong bayi dan saat itulah saksi mulai punya perasaan curiga terhadap terdakwa ;
- Bahwa kecurigaan saksi ternyata benar bahwa terdakwa telah membuang bayinya dengan diletakan dibawah pohon pisang bukan seperti kata terdakwa saat saksi, Endik dan teman Endik menanyakan dimana keberadaan bayi tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa bayi tersebut dititipkan ke tantenya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Endik Bin Puji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.30 wib ketika saksi keluar dari ATM Toserba Ceria saksi dimintai tolong oleh seorang laki-laki untuk melihat seorang perempuan yang sedang menggendong bayi dalam keadaan yang masih berdarah dan saksi menjawab dimana dan dijawab oleh laki-laki tersebut dijalan Junaidi, dan setibanya di Jalan Junaidi saksi bertemu dengan saksi Syah Roni dan saksi diberhentikan oleh Roni dan bertanya mau kemana dan saksi menjawab mau mencari terdakwa lalu saksi Ronipun minta diikutkan untuk mencari terdakwa dan bertemu dengan terdakwa namun tidak sedang menggendong bayinya lagi;
- Bahwa kemudian ditanya oleh saksi dimana bayi tersebut dan dijawab terdakwa saat itu kalau bayinya dititipkan pada tantenya namun jawaban terdakwa seperti orang panik dan ketakutan;



- Bahwa lalu saksi Roni mengatakan kepada terdakwa agar bayi tersebut diambil saja dan dibawa ke rumah sakit namun terdakwa tidak mau karena nanti dimarahi oleh keluarga dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa orang lahat ketika ditanya terdakwa berasal dari mana;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, pakaiannya penuh dengan darah. ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan pergi entah kemana, lalu saksi, Saksi Roni dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut merasa curiga dengan kata—kata terdakwa bahwa bayi tersebut dititipkan ke tantenya sehingga disepakati untuk mencari bayi tersebut dan bayi tersebut ditemukan oleh Takin dan Roni dibawah pohon pisang ;
- Bahwa saat mencari bayi tersebut saksi dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut berpisah sedangkan saksi Roni mencari bersama dengan Takin ;
- Bahwa benar bayi terdakwa tersebut ditemukan oleh saksi Roni di kebun pisang Jalan Kelurahan Rt 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa kemudian bayi tersebut dikasih kain dan madu lalu diazankan oleh warga setempat dan kemudian bayi tersebut dibawah ke tante Yayan yang bernama bidan Elpina untuk mendapatkan perawatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Elpina Am.Keb Bt Dulhajar;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembuangan bayi oleh terdakwa, akan tetapi saksi didatangi oleh keponakan saksi yang bernama Yayan dan beberapa temannya sambil membawa seorang bayi perempuan untuk dirawat sementara ;
- Bahwa benar ketika Yayan, Takin dan Roni datang ke rumah saksi dengan membawa bayi perempuan tersebut dan menceritakan kalau bayi tersebut ditemukan di batang pohon pisang, lalu saksi menyuruh Yayan untuk membeli susu, namun bayi tersebut tidak mau meminum susu formula sehingga saksi meminta tolong agar istri Takin yang sedang menyusui



didatangkan untuk menyusui bayi tersebut, dan setelah disusui bayinya langsung tertidur ;

- Bahwa setelah bayi tersebut tertidur saksipun langsung pergi bekerja ;
- Bahwa ketika saksi berada di kantor saksi ditelpon oleh suami saksi karena ada pihak kepolisian di rumah saksi menanyakan tentang bayi tersebut sehingga saat itu juga saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa benar oleh pihak kepolisian menyerahkan sementara bayi tersebut ke saksi untuk dirawat ;
- Bahwa saksi merawat bayi tersebut kurang lebih satu bulan lamanya dan saksi memberikan nama terhadap bayi tersebut adalah Rere ;
- Bahwa benar ketika saksi menerima bayi tersebut dari Yayan, kondisi bayi tersebut sehat dan tali pusarnya sudah di potong sehingga saksi hanya mengolesi betadine saja ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian bayi tersebut diambil oleh pihak Dinas Sosial dan saksi menyerahkannya ke dinas sosial melalui pihak kepolisian dan ada dibuat tanda terimanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi Yesi Binti Helmi (ibu terdakwa),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa adalah anak kandung saksi satu-satunya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembuangan bayi oleh terdakwa, akan tetapi saksi maupun suami saksi dihubungi pihak sekolah bahwa terdakwa minggat sehingga suami saksi langsung ke Lubuklinggau untuk mencari tahu keberadaan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil dan siapa ayah dari bayi tersebut, dan setelah di Polres Lubuklinggau saksi mengetahui kalau anak saksi (terdakwa) sedang hamil dan telah melahirkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah menghamili terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "bapak tu lah" sehingga membuat saksi terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung suami saksi menyetubuhi terdakwa ;
- Bahwa yang biasanya menjemput terdakwa saat liburan adalah saksi ;
- Bahwa saksi sudah curiga kalau terdakwa hamil hanya takut karena saksi sering diancam oleh suami saksi begitupun kalau malam-malam saksi sering mendengar terdakwa menangis namun ketika saksi terbangun oleh suami saksi langsung menyuruh saksi tidur kembali ;
- Bahwa benar terdakwa punya kamar sendiri namun biasanya kalau terdakwa liburan langsung disuruh suami saksi agar tidurnya sama-sama dan posisinya selalu terdakwa yang ditengah dan saksi dipaksa oleh suami saksi agar tidur menghadap ke dinding tidak boleh saling berhadapan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ada rasa curiga dalam hati kalau suami saksi telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri hanya saja ketika saksi bertanya suami saksi langsung memarahi saksi bahkan mengancam saksi sehingga saksi tak dapat berbuat apa-apa ;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi tahun 1999 dan dikaruniai satu anak perempuan yaitu terdakwa kemudian ditahun 2000 suami saksi menceraikan saksi dan tahun 2006 suami saksi kembali menikahi saksi ;
- Bahwa saksi tidak menyangka sama sekali kalau suami saksi yang tak lain adalah bapak kandung terdakwa melakukan perbuatan sekeji itu terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi maupun seluruh keluarga tidak ingin merawat bayi yang dilahirkan oleh terdakwa, saksi maupun seluruh keluarga merelakan bayi tersebut dirawat oleh orang lain ;
- Bahwa yang saksi inginkan adalah biarlah suami saksi yang saat ini di proses di Polres Empat Lawang dihukum seberat-beratnya ;
- Bahwa saksi mengharapkan terdakwa masih dapat melanjutkan pendidikannya demi masa depannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyesal karena tidak berani melawan suami saksi sehingga dampaknya terjadi pada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa masih duduk dibangku kelas VIII dan masih berumur 13 tahun ;
- Bahwa benar nanti setelah selesai perkara terdakwa ini saksi bersama kakek buyut terdakwa akan memasukan terdakwa kembali ke Pesantren Ar-Raudah di Pandeglang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi Mulyeni Binti Sarkowi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah murid saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembuangan bayi oleh terdakwa, akan tetapi saat saksi hendak menemui adik saksi di depan gerbang Pesantren saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian dan mendengar kalau terdakwa sudah kembali ke asrama ;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian datang ke Pondok Pesantren, saksi dan beberapa guru serta kepala sekolah dikejutkan oleh ketiadaan salah satu murid yakni terdakwa, dan beberapa jam kemudian terdakwa sudah berada di ruang kepala sekolah atau kepala asrama dan melihat kalau terdakwa sudah tidak berhijab dan roknya penuh darah lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa roknya penuh darah dan kenapa pergi dari asrama tidak bilang sama saksi dan saat itu dijawab terdakwa bahwa terdakwa kangen dengan keluarga dan sedang halangan sehingga berlumuran darah ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui kalau dianya hamil dan telah melahirkan seorang bayi, Kemudian kepala asrama meminta saksi untuk mendampingi terdakwa ke rumah sakit sobirin untuk diperiksa dan diperiksa di ruang IGD dan petugas tersebut mengatakan bahwa terdakwa habis bersalin dan perlu perawatan selama 2 hari ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian dari keterangan pihak kepolisian mengatakan bahwa terdakwa telah mengakui bahwa ianya hamil dan telah



melahirkan seorang anak perempuan hasil persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri yang bernama Azhari ;

- Bahwa keseharian terdakwa di sekolah adalah terdakwa anak yang aktif dan termasuk 10 besar ( rangking 8), dan sehari sebelum terdakwa minggat dari asrama dianya ikut juga kegiatan drumband, akan tetapi saksi tidak pernah curiga kalau terdakwa hamil dikarenakan tubuh terdakwa agak bongsor dan pakaian yang digunakan biasanya yang longgar-longgar sehingga tidak Nampak kalau hamil ;
- Bahwa pihak sekolah masih siap menerima kembali terdakwa, hanya saja tergantung dengan terdakwa sendiri apakah masih mau sekolah di Ponpes tersebut dikawatirkan beban psikologis terdakwa dikarenakan teman-temannya sudah mengetahui kejadian yang dialami terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. **Saksi Dahlia (saksi yang akan mengadopsi bayi terdakwa)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk mengadopsi bayi terdakwa tersebut dan sudah ada persetujuan dari Dinas Sosial dan bayi tersebut sudah dua minggu bersama saksi ;
- Bahwa benar saksi sudah menikah dua puluh tahun lamanya akan tetapi belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi diberitahu oleh cucu saksi yang berada di Lubuklinggau apakah nenek mau mengangkat anak karena ada orang yang telah membuang bayinya dan saat ini bayi tersebut berada di Dinas Sosial sehingga saksi mendatangi Dinas Sosial lalu bayi tersebut diserahkan ke saksi beserta dokumen ;
- Bahwa saksi dan suami saksi saat ini sedang mengurus surat-surat guna mengadopsi bayi terdakwa tersebut namun belum sampai ke pengadilan karena surat-suratnya belum lengkap ;
- Bahwa benar saksi menamai bayi tersebut Rere Dahlia ;





- Bahwa saksi berjanji akan menganggap anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri akan diberikan pendidikan yang baik serta berharap dan berdoa semoga bayi ini akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan keluarga. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya tetapi terdakwa melalui ibu terdakwa dan seluruh keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial serta ikhlas dan tidak akan menuntut apapun terhadap siapa saja yang akan mengangkat bayi terdakwa menjadi anaknya;

7. **Saksi Zukkrullah Muttaqim Als Takin Bin Muhamad**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana BAP saksi pada tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Eko Lesmana dan Dedy Heriawan, SH penyidik pada Polres Lubuklinggau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.30 wib di kebun pisang Jalan Kelurahan Rt 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau ada seorang perempuan yang meninggalkan bayinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.00 wib saat itu saksi habis mengantar teman saksi di simpang periuk dan sewaktu di jalan saat saksi mau pulang kerumah saksi melihat seorang wanita sedang menggendong bayi yang roknya terdapat bercak darahnya pada bagian depan, kemudian saksi mencari warga yang berada disekitar tempat tersebut tapi tidak ada dan sewaktu saksi kembali ketemu dengan saudara Roni di Gang Junaidi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya "Ado ninggok cewe bawa bayi dak? Roknyo itu darah galo-galo" dan dijawab oleh saudara Roni "Ado didalam, cepetlah kito selamatin bayinyo", kemudian saudara Roni menaiki sepeda motor milik saksi dan bersama mencarinya dan sewaktu lampu sepeda motor saksi ke pohon-pohon pisang saksi melihat bayi tersebut lalu saksi dan saudara Roni mengedor rumah warga dan saudara Roni sudah menggendong bayi tersebut kemudian bayi tersebut diselimuti baju saksi dan dibawa masuk kerumah warga ;
- Bahwa kemudian datanglah saudara Hendik dan Yayan dan saudara Yayan berkata "Bawa ke tempat tante aku bae Bidan" dan kemudian saksi yang menggendong bayi tersebut dan Yayan yang membawa sepeda motor diikuti oleh Roni dan Hendik menggunakan sepeda motor kemudian sampainya di Bidan langsung dipotong tali pusarnya dan dibedong kemudian dimasukan ketempat bayi dan saksi, Yayan, Hendik dan Roni melapor ke ketua RT;



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. **Saksi Afriansyah Als Yayan Bin Muhamad**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana BAP saksi pada tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Christina CT dan Muzamil, SH penyidik pada Polres Lubuklinggau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.30 wib di kebun pisang Jalan Kelurahan Rt 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau ada seorang perempuan yang meninggalkan bayinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 04.10 wib ketika saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saudara HEndik kerumah saksi dan berkata "Yan ada seorang perempuan yang membawa bayi", saksi jawab "Dimana dik? " dijawab saudara Hendik "Di Jalan Junaidi kelurahan watervang", ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Hendik langsung menuju Jalan Junaidi dan bertemu dengan saudara Roni dan Yayan yang sedang mencari bayi tersebut, sedangkan saksi bersama dengan Hendik mencari ibu dari bayi tersebut tapi tidak bertemu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Hendik kembali lagi dan masuk kerumah warga dan disana sudah ada saudara Roni dan Takin dan seorang bayi perempuan yang dibungkus baju saudara Takin kemudian bayi tersebut diberi madu dan diazankan, selanjutnya saksi mengajak Roni, Takin dan Hendik untuk mebawa bayi tersebut kerumah tante saksi yang merupakan seorang bidan yang bernama Elpina dan setibanya disana bayi tersebut langsung dirawat dan saksi bersama Takin pergi membeli susu dan melapor ke ketua RT;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. **Saksi Oki Bin M. Zen**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana BAP saksi pada tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Christina CT dan Muzamil, SH penyidik pada Polres Lubuklinggau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 06.30 Wib ketika saksi telah selesai makan empek - empek dan hendak membeli air minum mineral , saksi melihat seorang perempuan yang sedang menggunakan baju kaos warna coklat yang penuh darah , dan celana lepis pendek batas lutut penuh darah. Kemudian saksi mendekati dan bertanya : “kenapa pakaian kamu darah semua” dijawab perempuan tersebut “tangan saya luka” selanjutnya saksi melihat tangan perempuan tersebut , akan tetapi tidak ada luka. Kemudian saksi kembali bertanya : “kamu orang mana “ dijawab perempuan tersebut : “saya orang tebing” saksi kembali bertanya : “kenapa kamu ada disini” dijawabnya : “saya sekolah dipesantren” saksi kembali berkata : “pulanglah dek disini banyak orang nakal perempuan tersebut menjawab : “saya takut nanti dimarah ustadzah” saksi kembali bertanya : “sebenarnya kamu ada masalah apa” dijawab perempuan tersebut : “tidak ada apa – apa” saksi kembali berkata : “kenapa kamu sangat lesu , apa kamu belum makan” dijawabnya : “iya saya belum makan”, saksi: “kalau mau makan saya belikan” dijawabnya kembali : “tidak mau , saya ngantuk kak” saksi kembali menjawab : “kalau adik ngantuk adik pulang saja” dijawab perempuan tersebut : “tidak mau , kalau saya tidak memakai jilban , baju tangan panjang sama angrok” saksi kembali berkata : “kalau baju tangan panjang sama anrok kakak tidak bisa membelinya , tapi kalau jilbab bisa” dijawabnya : “saya tidak mau kak kalau tidak ada baju sama anrok, saya mau tidur kak dari semalam saya tidak tidur – tidur” saksi kembali menjawab : “kalau adik mau adik bisa tidur di rumah teman kakak , ada orang tua dan adik perempuannya”, dijawab perempuan tersebut : “iya kak “ kemudian saksi dan perempuan tersebut pergi ke rumah teman saksi , setibanya saksi langsung bercerita dengan orang orang tua dan teman saksi kemudian perempuan tersebut dipersilahkan untuk tidur di kamar. kemudian berkisar 1 ( satu ) jam perempuan tersebut saksi bangunkan dan berkata : “dek bangun ini sudah siang nanti kakak antar pulang kakak belikan jilbab” dijawabnya : “saya tidak mau , kak saya mau ke kamar mandi mau bunag air kecil” saksi menjawab : “adik langsung mandi saja , nanti kakak pinjamkan baju” selanjutnya perempuan tersebut langsung ke kamar mandi , setelah itu memakai baju saksi dan langsung saksi antar kembali kepesantren AI Ikhlas. Kemudian ketika tiba di depan gerbang pesantren perempuan tersebut hendak turun , akan tetapi saksi cegah. Kemudian masuk ke dalam komplek pesantren setibanya bertemu dengan anggota Polres Lubuklinggau , setibanya perempuan



tersebut dibawa oleh ustadnya. Kemudian saksi ditanya oleh anggota Polisi dan tidak lama kemudian perempuan tersebut dan saksi langsung dibawa oleh polisi, selanjutnya perempuan tersebut langsung dilakukan perawatan di rumah sakit dan saksi langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. **Saksi Azhari Bin Juni**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana BAP saksi pada tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Christina CT dan Muzamil, SH penyidik pada Polres Lubuklinggau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Meyta Yulike merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Meyta adalah pelajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas kelas VIII;
- Bahwa benar saksi ada melakukan persetubuhan dengan terdakwa berkisar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan tersebut dengan cara membuka celana dan celana dalamnya dari belakang pada saat Meyta sedang tidur dengan posisi miring, setelah itu saksi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Meyta dan selanjutnya saksi mengeluarkan sperma dan dimasukan kedalam lubang kemaluan Meyta;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Meyta tidak ada melakukan ancaman hanya membuka secara paksa celana dan celana dalam Meyta ;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Meyta banyak diam dan melamun dan saksi tidak tahu kalau Meyta hamil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelepon oleh pihak sekolah yang mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Meyta telah kabur dari sekolah sejak hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 dan ditanya oleh pihak sekolah apakah Meyta ada pulang ke kampung dan dijawab oleh saksi tidak ada, kemudian saksi berangkat ke Lubuklinggau dan setelah tiba di Pondok Pesantren saksi sudah ditunggu oleh anggota Polisi dan langsung diinterogasi dan saksi mengakui telah menyetubuhi anak saksi ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang benar Bapak terdakwa menyetubuhi sebanyak 5 (lima) kali;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masih berstatus pelajar sekolah di SMP Al-Ikhlas kelas VIII, dan umur terdakwa baru 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa awal kejadian terdakwa meninggalkan bayi tersebut bermula dari tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa merasa sakit perut dan saat itu mengira hendak buang air besar dan terdakwa ke kamar mandi dan buang air besar namun masih saja sakit perut terdakwa dan saat itu dalam perut terdakwa ada yang bergerak kencang dan tak lama kemudian dari kemaluan terdakwa ada air yang keluar sehingga terdakwa mulai yakin kalau hendak melahirkan sehingga saat itu juga terdakwa langsung secara diam-diam keluar dari asrama dan berjalan menuju ke jalan Junaidi Kelurahan Watervang dan saat diperjalanan terdakwa merasakan ada yang hendak keluar dari kemaluan terdakwa dan terdakwa merasakan akan mengedan sehingga terdakwa berhenti sebentar di samping tong sampah dan berapa menit kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tali pusarnya dengan menggunakan tangan terdakwa hingga putus dan dari kemaluan terdakwa keluar segumpal darah yang saksi tidak tahu apa itu, lalu terdakwa bingung hendak dibawa kemana bayi tersebut sehingga saat itu juga terbesit pikiran terdakwa untuk meninggalkan bayi terdakwa tersebut karena terdakwa tidak menginginkan bayi tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan sambil mengendong bayi yang baru dilahirkan tersebut menuju Jalan Junaidi Kelurahan Watervang dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh agar terdakwa menunggunya namun terdakwa tidak mau menunggu laki-laki tersebut karena takut ketahuan orang, lalu terdakwa terus berjalan dan tiba didekat plang yang bertuliskan “**Kantor Lurah Watervang**” dan langsung meletakan bayi tersebut dibawah batang pohon pisang tanpa dibungkus sehelai kain apapun, dan terdakwa membuang segumpal darah (Ari-ari) ke dalam kolam, dan saat terdakwa hendak keluar dari tempat kejadian tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Roni dan saksi Endik serta satu orang laki-laki lagi dan menanyakan dimana terdakwa meletakan bayi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa menitipkan ke tante terdakwa, lalu ditanya lagi terdakwa orang mana dan terdakwa menjawab orang Lahat, lalu oleh ketiga orang laki-laki tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh agar terdakwa mengambil bayinya dan dibawa ke rumah sakit namun terdakwa keberatan dengan alasan takut dimarahi oleh keluarga ;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke terminal atas dan bertemu dengan laki-laki yang bernama Oki dan oleh Oki terdakwa diantar ke rumah temannya lalu terdakwa tidur karena kecapean dan beberapa jam kemudian terdakwa minta diantarkan ke Pondok Pesantren oleh Oki setelah terdakwa mandi di rumah teman Oki yang ada orang tuanya ;
- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren sudah ada pihak kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke rumah sakit Dr.Sobirin untuk diperiksa ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan bayi terdakwa tersebut karena terdakwa bingung mau di titipkan dimana bayi itu karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas;
- Bahwa kejadian terdakwa meninggalkan bayinya tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau sekira jam 05.00 wib ;
- Bahwa bayi tersebut adalah hasil persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung terdakwa saat bulan juni 2013 ketika terdakwa pulang ke kampung sewaktu liburan sekolah;
- Bahwa benar bapak kandung terdakwa menyetubuhi terdakwa secara paksa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa dikarenakan bapak terdakwa selalu mengancam akan memukul terdakwa apabila menceritakan kepada ibu terdakwa dan hingga terdakwa hamilpun terdakwa tidak menceritakan kepada siapapun termasuk ibu terdakwa ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa benci dengan bapak kandung terdakwa karena telah merusak masa depan terdakwa dan terdakwa meminta agar bapak terdakwa dihukum seumur hidup ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah membuang bayi tersebut namun terdakwa belum siap menjadi ibu dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar cita-cita terdakwa ingin menjadi seorang guru agama;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat ditanya oleh guru-guru terdakwa saat di Pondok Pesantren tersebut apakah terdakwa baru saja melahirkan dan terdakwa menjawab tidak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berani mengakui kalau terdakwa baru saja melahirkan dikarenakan terdakwa takut kalau terdakwa dikeluarkan dari sekolah tersebut karena terdakwa masih ingin sekolah ;
- Bahwa setelah di kantor polisi terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja melahirkan anak perempuan dan sudah terdakwa buang dikarenakan bayi tersebut adalah hasil persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar bapak kandung terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan terdakwa melalui pantat atau belakang ;
- Bahwa benar terdakwa dan pihak keluarga yaitu ibu dan pihak Keluarga yang lain yaitu Kakek Buyut sudah mengiklaskan bayi terdakwa dipelihara atau diasuh oleh orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju kaos, lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih pada bagian depan ada gambar jam dan seorang perempuan serta ada noda darahnya;
- Tanktop dengan garis-garis warna hitam dan putih ;
- Rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna hijau yang ada bercak darahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masih berstatus pelajar sekolah di SMP Al-Ikhlas kelas VIII, dan umur terdakwa baru 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa telah meninggalkan bayi yang baru dilahirkannya di dekat plang yang bertuliskan “Kantor lurah Watervang” dibawah pohon pisang ;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa merasa sakit perut ;
- Bahwa benar kemudian dari dalam perut terdakwa ada yang bergerak kencang dan tak lama kemudian dari kemaluan terdakwa ada air yang keluar sehingga terdakwa mulai yakin kalau hendak melahirkan ;



- Bahwa benar terdakwa langsung secara diam-diam keluar dari asrama dan berjalan menuju ke jalan Junaidi Kelurahan Watervang dan saat diperjalanan terdakwa merasakan ada yang hendak keluar dari kemaluan terdakwa dan terdakwa merasakan akan mencedan sehingga terdakwa berhenti sebentar di samping tong sampah dan berapa menit kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa benar terdakwa ada menarik tali pusar bayi yang baru dilahirkannya dengan menggunakan tangan terdakwa hingga putus ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bingung hendak dibawa kemana bayi tersebut sehingga saat itu juga terbesit pikiran terdakwa untuk meninggalkan bayi terdakwa tersebut karena terdakwa tidak menginginkan bayi tersebut karena masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan tersebut menuju Jalan Junaidi Kelurahan Watervang dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh agar terdakwa menunggunya namun terdakwa tidak mau menunggu laki-laki tersebut karena takut ketahuan orang, lalu terdakwa terus berjalan dan tiba didekat plang yang bertuliskan **“Kantor Lurah Watervang”** dan langsung meletakkan bayi tersebut dibawah batang pohon pisang tanpa dibungkus sehelai kain apapun;
- Bahwa benar saat terdakwa hendak keluar dari tempat kejadian tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Roni dan saksi Endik serta satu orang laki-laki lagi dan menanyakan dimana terdakwa meletakkan bayi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa menitipkan ke tante terdakwa;
- Bahwa benar bayi terdakwa tersebut ditemukan oleh Syah Roni, Muhamad Takin dan Yayan kemudian bayi tersebut di bawa ke bidan Elpina;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke terminal atas dan bertemu dengan laki-laki yang bernama Oki dan oleh Oki terdakwa diantar ke rumah temannya lalu terdakwa tidur karena kecapean dan beberapa jam kemudian terdakwa minta diantarkan ke Pondok Pesantren oleh Oki setelah terdakwa mandi dirumah teman Oki yang ada orang tuanya ;
- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren sudah ada pihak kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke rumah sakit Dr.Sobirin untuk diperiksa ;





- Bahwa benar bayi tersebut adalah hasil persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung terdakwa saat bulan juni 2013 ketika terdakwa pulang ke kampung sewaktu liburan sekolah;
- Bahwa benar terdakwa tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa dikarenakan bapak terdakwa selalu mengancam akan memukul terdakwa apabila menceritakan kepada ibu terdakwa dan hingga terdakwa hamilpun terdakwa tidak menceritakan kepada siapapun termasuk ibu terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah membuang bayi tersebut namun terdakwa belum siap menjadi ibu dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah di Pesantren;
- Bahwa benar cita-cita terdakwa ingin menjadi seorang guru agama;
- Bahwa benar bapak kandung terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan terdakwa melalui pantat atau belakang ;
- Bahwa benar terdakwa dan pihak keluarga yaitu ibu dan pihak Keluarga yang lain yaitu Kakek Buyut sudah mengiklaskan bayi terdakwa dipelihara atau diasuh oleh orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah ;
- Bahwa benar bayi terdakwa sudah diserahkan ke Dinas Sosial dan saat ini diasuh oleh Dahlia yang mengangkatnya sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang ;



2. Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;





**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat -akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "**menghendaki**" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "**mengetahui**" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlakuan penelantaran anak, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 02.00 wib terdakwa (yang masih berumur 13 tahun, lahir pada tanggal 7 Mei 2000, berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talang Padang.Kabupaten Empat Lawang) merasakan sakit perut dan mengira bahwa akan Buang Air Besar (BAB) ;

Menimbang, bahwa ialu terdakwa ke kamar mandi dan langsung BAB, lalu setelah BAB perut terdakwa masih saja terasa sakit dan dari dalam perut ada yang bergerak dan tak lama kemudian ada air yang keluar dari kemaluan terdakwa dan saat itu perut terdakwa tambah sakit ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa merasakan bahwa terdakwa akan melahirkan sehingga saat itu juga terdakwa diam-diam tanpa seijin Kepala PonPes langsung keluar dari pondok pesantren tersebut dengan tersendat-sendat agar tidak diketahui oleh guru maupun teman-teman terdakwa lainnya, lalu terdakwa berjalan menuju ke jalan Junaidi Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dan saat diperjalanan terdakwa merasakan ada yang akan keluar dari kemaluan terdakwa dan terdakwa merasakan seperti hendak mendedan lalu terdakwa berhenti disamping tempat sampah dan duduk ditengah kemudian terdakwapun mendedan sebanyak 2 (dua) kali dan disaat mendedan yang kedua kali tersebut lahirlah seorang bayi perempuan dari Rahim terdakwa yang dalam keadaan menangis ;

Menimbang, bahwa lalu oleh terdakwa bayi tersebut ditelentangkannya kemudian tali dipusatnya yang menyambung dengan perut terdakwa langsung diputuskannya dengan cara menariknya kuat-kuat dan beberapa saat kemudian tanpa terdakwa ketahui dari kemaluan terdakwa keluar segumpal yang menyerupai daging serta darah (ari-ari) lalu terdakwa memegang tali dan segumpal daging (ari-ari) dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menggendong bayi terdakwa dan terdakwa terus berjalan sambil berpikir untuk membuang bayi tersebut dan ketika terdakwa sampai di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat plang bertuliskan "Kantor Lurah Watervang" terdakwa yang tidak menginginkan bayi terdakwa langsung meletakkan bayi tersebut ditanah dibawah pohon pisang yang jaraknya  $\pm 3$  (tiga) meter dari pinggir jalan dengan keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwaupun pergi meninggalkan bayi terdakwa seorang diri dan dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat kolam lalu terdakwa buang ari-ari tersebut didalam kolam lalu terdakwa pergi ke arah pasar terminal atas. namun sebelum sampai di Pasar terminal terdakwa bertemu dengan saksi Syah Rony Abdullah dan oleh saksi Syah Rony Abdullah yang sebelumnya sudah melihat terdakwa sambil menggendong bayi menanyakan kepada terdakwa "dimana bayinya? dan dijawab terdakwa "dititipkan dirumah tante " kemudian terdakwaupun bergegas pergi meninggalkan saksi Rony Abdullah menuju ke Pasar ;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Pasar. terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal bernama OKI, lalu OKI bertanya kepada terdakwa "nak kemano" lalu dijawab terdakwa " nak balek kesekolah aku" lalu OKI bertanya " ngapo kau **pake** handuk" lalu dijawab terdakwa " aku minggat" dan ditanya lagi oleh OKI " ngapo kau bhrdarah galo" lalu dijawab terdakwa " aku lagi mensturasi" lalu terdakwaupun dibawa OKI kerumah temannya didaerah Tanjung Indah dan ditempat itu ibu dari teman Oki menyuruh terdakwa untuk mandi lalu mengganti baju dan celana, dan saat itu karena kelelahan habis melahirkan terdakwaupun tertidur dan sekira jam 11.00 wib terdakwa disuruh makan lalu sekitar jam 11.30 wib terdakwa diantar OKI ke Pondok Pesantren dengan menggunakan ojek dan ternyata di pondok pesantren tersebut sudah ada polisi kemudian terdakwaupun dibawa ke Rumah Sakit Sobirin untuk mendapatkan perawatan dan terdakwa mengakui bahwa telah meninggalkan bayinya ditempat kejadian karena bayi tersebut adalah hasil persetubuhan yang dilakukan secara paksa (incest) oleh ayah kandung terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya meninggalkan bayi yang baru dilahirkannya dan dengan kesadaran pasti untuk meletakkan dan meninggalkan bayinya sendiri dengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 268/Pid/AN/2014/PN.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua) untuk memelihara, merawat, atau mengurus bayi yang baru dilahirkannya sebagaimana mestinya yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bayinya seperti sakit atau penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dibebani tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) No. Reg. PK.01.05.02-110 yang dibuat oleh Ade Chandra, SH selaku pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat pada pokoknya memberikan saran agar apabila klien dinyatakan bersalah, maka demi kepentingan anak agar kiranya diputus anak kembali ke orang tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek terdakwa adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan memutuskan sanksi yang tepat terhadap terdakwa, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan perlakuan pidana khusus bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang berusia dewasa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa Meyta masih berusia 13 (tiga belas) tahun dimana dalam melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni karena selain itu sebelumnya Terdakwa Meyta juga merupakan korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh Bapak kandungnya sendiri (incest);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga sebagai korban tindak pidana seharusnya lebih dahulu dilindungi oleh negara dan masyarakat namun hal tersebut tidaklah dilakukan sehingga terdakwa Meyta pada saat melahirkan bayinya tidak tahu harus kemana, ia tidak punya sanak keluarga dilubuklinggau dan pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan belajar disekolahnya di



pesantren Al Ikhlas sehingga ia terdakwa mengalami kebingungan selain itu terdakwa juga merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu serta menyadari bahwa kehamilannya merupakan suatu aib karena hasil persetubuhan paksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya (incest) dan tidak mungkin ia harus berterus terang mengenai kehamilannya karena akan menanggung malu dan tidak dapat melanjutkan sekolah nantinya dan seandainya kehamilan dari terdakwa diketahui lebih dahulu oleh orang tuanya dalam hal ini ibunya maka perbuatan terdakwa yang menelantarkan bayinya tersebut pasti tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Terdakwa tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu terdakwa dikarenakan Bapak terdakwa selalu mengancam akan memukul terdakwa apabila menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Terdakwa sedangkan Ibu Terdakwa sendiri menerangkan bahwa suami/ayahnya terdakwa sering marah-marah apabila ibu terdakwa menanyakan mengenai keadaan Terdakwa Meyta;

Menimbang, bahwa kehamilan yang terjadi pada diri terdakwa bukanlah kehendak yang diinginkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui dirinya hamil sampai terdakwa baru menyadari diperutnya ada bayi karena merasakan ada sesuatu yang bergerak didalam perutnya sehingga pada tanggal 07 Maret 2014 pada saat terdakwa akan melahirkan, terdakwa kebingungan sehingga terdakwa pergi ke Jalan Junaidi Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I disamping tempat sampah dan melahirkan sendiri tanpa ada pertolongan dari orang lain yang mungkin bisa saja merengut nyawa terdakwa dan bayinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bayi terdakwa lahir, terdakwa sendiri bingung harus dibawa kemana bayinya karena saat itu pikiran Terdakwa masih ingin bersekolah dan kembali ke Sekolah di Pondok Pesantren AL-IKLAS sehingga terdakwa terlihat oleh saksi Syah Ronny Abdullah dan Endik Bin Puji serta Afriansyah menggendong bayinya di Jalan Junaidi, setelah itu terdakwa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan bayinya di kebun pisang dekat kantor lurah dengan harapan bayi tersebut dapat ditemukan orang lain dan oleh karena terdakwa sendiri masih anak-anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan tidak terbayang dalam pikiran terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang meninggalkan bayinya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi bayinya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum siap menjadi seorang Ibu karena masih ingin melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren dan mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ibu terdakwa dan buyut terdakwa bahwa adalah tidak mungkin untuk membawa dan merawat bayi Meyta kedalam lingkup keluarganya karena anak tersebut merupakan hasil persetubuhan paksa dengan ayah kandungnya (incest) dan merupakan aib bagi keluarga sehingga pihak keluarga dan terdakwa Meyta sendiri bersepakat bayi Meyta diserahkan kepada dinas sosial di Lubuklinggau dan juga ikhlas apabila dikemudian hari dirawat dan diasuh oleh orang lain yang mengasahi dan menyayangi anak tersebut seperti anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah melihat anak dari terdakwa yang diberi nama Rere Anggraini dalam keadaan sehat dan berdasarkan keterangan dari ibu Dahlia yang akan mengangkat dan bersedia mengasuh bayi dari Meyta tersebut berjanji akan memperlakukan bayi tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Guru Pondok Pesantren Al - Ikhlas yang bernama Muleni Binti Sarkowi bahwa terdakwa merupakan murid yang berprestasi dan aktif dalam kegiatan seperti Drumband juga terdakwa masih terdaftar sebagai siswa kelas VIII dan Pondok Pesantren Al – Ikhlas tetap menerima Terdakwa sebagai siswa ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai **restorative justice** yang menjadi tujuan pemidanaan dewasa ini yang menekankan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana, yang pada intinya bahwa Terdakwa menyatakan masih sangat berharap untuk kembali hidup di tengah-tengah keluarganya bersama-sama dengan orang tua (dalam hal ini ibunya), melanjutkan sekolahnya di pesantren demi mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang guru agama dan bergaul dengan masyarakat sekitar untuk menata kembali masa depannya yang masih panjang, begitu pula dengan orang tua Terdakwa yaitu Ibu kandungnya yang menyatakan masih sanggup untuk memelihara, merawat, mendidik dan mengasuh Terdakwa untuk mempersiapkan masa depannya menjadi lebih baik. Sejalan dengan itu juga Hakim Pengadilan Negeri



Lubuklinggau melihat bahwa bayi yang dilahirkan oleh terdakwa juga dalam keadaan sehat dan diasuh oleh saksi Dahlia yang berniat untuk mengangkat bayi/anak dari terdakwa menjadi anaknya melalui Dinas Sosial Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (***Convention on The Rights of The Child***) tahun 1990, dengan Keppres No.36 tahun 1990, maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan “**Restorative Justice**”, yang menitik beratkan pada **pemulihan kondisi**, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan **demi kepentingan terbaik** baik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Restorative Justice** adalah suatu penyelesaian sengketa secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan bukan pembalasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 huruf b Konvensi hak-hak anak yang berbunyi “**Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat**”, dan sebagai implementasi dari konvensi hak hak anak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia tersebut telah lahir Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah diamanatkan pula dalam Pasal 16 (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atau **Pidana Penjara Anak** hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai **Upaya Terakhir (Ultimun Remedium)**, hal ini telah pula di pertegas oleh Prof. Dr. Bagir Manan ,S.H., MCL ( mantan Ketua Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa: “**Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari Penjara Anak**” (Dalam “*Pemetaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Anak Bermasalah Hukum Tahun 2007 Propinsi Lampung*” oleh Deputy Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, hlm. 2, dengan mengutip Kompas, November 2007);;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara dapat pula menjatuhkan hukuman berupa tindakan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. **Mengembalikan kepada orang tua , wali, atau orang tua asuh;**
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan perlakuan atau hukuman yang tepat yang akan dikenakan terhadap terdakwa yang merupakan anak, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan bayinya dapat menimbulkan bahaya bagi bayinya ;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh bapaknya (incest);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren di Pandeglang ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua Terdakwa di persidangan menyatakan sanggup untuk menjaga, mendidik dan membimbing kembali Terdakwa menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa masih mengalami trauma atas kejadian yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua dalam hal ini ibu Terdakwa, guru dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, maka telah cukup adil apabila Putusan yang akan dijatuhkan adalah berupa **tindakan Terdakwa dikembalikan kepada orang tua dalam hal ini ibunya** untuk di didik dan di bina menjadi anak bangsa yang berguna demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum di bawah pengawasan BAPAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya tentang penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa karena dapat memberikan stigma negatif kepada diri terdakwa yang akan menempel seumur hidup dengan menyandang status sebagai mantan narapidana dan apabila pembinaan Terdakwa dilakukan dalam LAPAS dengan kondisi Terdakwa masih berumur 13 tahun dan berstatus pelajar, tentunya pada saat ini kita ketahui bahwa pembinaan dan perkembangan pendidikan di Lapas belum memadai sedangkan terdakwa sebagai anak yang masih labil dan trauma atas peristiwa yang terjadi pada dirinya dikhawatirkan akan berpengaruh kepada psikologi dan tumbuh kembangnya bahkan mungkin akan mendapat pengaruh kurang baik dari lingkungan penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berupa tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa maupun preventif bagi masyarakat ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa Baju kaos, lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih pada bagian depan ada gambar jam dan seorang perempuan serta ada noda darahnya, Tanktop dengan garis-garis warna hitam dan putih, Rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna hijau yang ada bercak darahnya yang disita dari Terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari maka dikembalikan kepada Terdakwa Meyta Yulike Binti Azhari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Keppres 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MEYTA YULIKE BINTI AZHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran terhadap anak ;

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

**Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya dalam hal ini ibunya di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Lahat;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Baju kaos, lengan panjang motif garis-garis warna hitam dan putih pada bagian depan ada gambar jam dan seorang perempuan serta ada noda darahnya;
- Tanktop dengan garis-garis warna hitam dan putih ;
- Rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna hijau yang ada bercak darahnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MEYTA YULIKE BINTI AZHARI;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari: **SELASA**, tanggal **20 MEI 2014** oleh kami: **AGUS WINDANA, S.H.**, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: **HARMEN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan dihadiri oleh: **ERWINA M. DIMATNUSA, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh **Orang Tua terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa** dan dihadapan **terdakwa**.

Hakim Tunggal

Dto

Agus Windana, SH

Panitera Pengganti

Dto

Harmen, SH